



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

**TUGAS AKHIR**

**ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN KONTRA TERORISME PADA  
KELOMPOK MUJAHID INDONESIA TIMUR DI INDONESIA**

**PADA TAHUN 2015-2016**

**Diajukan oleh:**

**Deni Syahputra Nasution**

**17323067**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2021**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**Analisis Efektivitas Kebijakan Kontra Terorisme Pada Kelompok**  
**Mujahidin Indonesia Timur di Indonesia Pada Tahun 201-2016**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh  
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal  
**2 Desember 2021**

Mengesahkan

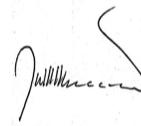
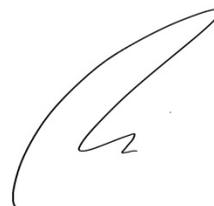
Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia  
Ketua Program Studi

  
Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A

Dewan Penguji

Tanda Tangan

- 1 Muhammad Zulfikar Rakhmad, B.A., M.A.,  
Ph.D
- 2 Hasbi Aswar, S.I.P., M.A., Ph.D
- 3 Willi Ashadi, S.H.I., M.A.







<b>TUGAS AKHIR</b>	1
<b>BAB I</b>	1
<b>PENDAHULUAN</b>	1
<b>1.1. LATAR BELAKANG</b>	1
<b>1.2. RUMUSAN MASALAH</b>	3
<b>1.3. TUJUAN PENELITIAN</b>	3
<b>1.4. SIGNIFIKANSI PENELITIAN</b>	4
<b>1.6. TINJAUAN PUSTAKA</b>	5
<b>1.7. LANDASAN TEORI/KONSEP/MODEL</b>	8
<b>1.8. METODE PENELITIAN</b>	9
<b>1.8.1 JENIS PENELITIAN</b>	9
<b>1.8.2 SUBJEK DAN OBJEK PENELITIAN</b>	10
<b>1.8.3 METODE PENGUMPULAN DATA</b>	10
<b>1.8.4 PROSES PENELITIAN</b>	10
<b>Mujahidin Indonesia Timur, Serangan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur Dan Posisi Indonesia Dalam Program Melawan Terorisme</b>	11
<b>2.1 Mujahidin Indonesia Timur (MIT)</b>	11
<b>2.2 Aksi teror yang dilakukan oleh MIT dibawah kepemimpinan Santoso (Mujahidin Indonesia Timur)</b>	17
<b>2.3 Posisi Indonesia Pada Program Perang Melawan Terorisme</b>	21
<b>2.4 Respon Pemerintah dalam menanggapi kelompok MIT</b>	22
<b>BAB. III</b>	28
<b>Analisis Kebijakan Kontra Terorisme di Indonesia Kepada Kelompok Mujahidin Indonesia Timur</b>	28
<b>3. Kebijakan Kontra Terorisme Pemerintah Indonesia Dalam Upaya Melawan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur</b>	28
<b>3.1.1. BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme)</b>	31
<b>3.1.2. Militer</b>	43
<b>BAB IV</b>	55
<b>Penutupan</b>	55
<b>4.1. Kesimpulan</b>	55

4.2. **Saran**

59

**DAFTAR PUSTAKA**

60



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Pada tanggal 11 September 2001, empat pesawat tempur Amerika Serikat dibajak oleh 19 orang teroris yang merupakan anggota dari jaringan teroris Islam, yaitu Al-Qaeda. Para teroris menabrakkan pesawat yang telah dibajak tersebut ke gedung WTC di New York, dan pesawat yang lain dijatuhkan di Pentagon di ibukota Amerika Serikat. Setelah kejadian tersebut, Presiden George W. Bush dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat pada saat itu Colin Powell membangun koalisi dunia untuk berperang melawan terorisme. Presiden Bush juga bertemu dengan para pemimpin dari setidaknya 51 negara yang bertujuan untuk membangun koalisi perang melawan teroris ini. Kampanye inipun ditanggapi dengan baik oleh seluruh negara yang ada di dunia. yang dibuktikan dengan berbagai tawaran bantuan militer dari 136 negara, 86 negara telah memberikan otoritas penerbangan yang lebih besar untuk pesawat militer AS, 76 negara telah memberikan hak mendarat untuk pesawat militer AS dan 23 negara telah setuju untuk menampung pasukan AS yang terlibat dalam operasi ini (The Coalition Information Centers, 2002).

Tak luput dari serangan teror, Indonesia juga terkena beberapa serangan teror yang dimulai dengan peristiwa bom Bali. Peristiwa bom Bali ini diaktori oleh JI atau Jamaah Islamiyah pada tahun 2001. Lalu, muncul lah kelompok Santoso yang merupakan lanjutan dari rangkaian teror yang berafiliasi dengan ISIS, yang menunjukkan bahwa terorisme di Indonesia sudah terintegrasi dengan kelompok terorisme global kelas dunia. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan pemerintah sangat diperlukan dalam menangani

kasus terorisme yang ada di Indonesia, yang mana pemerintah harus membangun langkah-langkah efektif untuk mencegah semua resiko yang ada. Karena pada dasarnya terorisme adalah sebuah kejahatan luarbiasa pada masyarakat yang menyebabkan serangan fisik maupun mental masyarakat itu sendiri. Dan terorisme adalah sebuah kejahatan yang biasanya sangat sistematis dan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tujuan khusus baik dalam segi politik, ekonomi maupun sosial (Sahasrad, 2016).

Setelah fase Abu Bakar Ba'asyir dan Abdullah Sungkar yang membentuk kelompok JI atau Jamaah Islamiyah. Mulai muncul lah banyak kelompok lain yang melakukan aksi teror di Indonesia yakni seperti Jamaah Anshar Tauhid (JAT), Mujahidin Indonesia Barat (MIB), Mujahidin Indonesia Timur (MIT), Jamaah Anshar Daulah (JAD) yang kemudian jamaah-jamaah ini bergabung dan memberi dukungan kepada ISIS. Tetapi dari banyaknya serangan teror yang ada di Indonesia tidak semuanya hasil dari serangan kelompok-kelompok ini. Menurut Abdurrahman seorang intelijen yang menangani kasus teror di Indonesia, banyak kasus yang ditunggangi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kasus murni yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ini disinyalir hanya dua kasus, yakni kasus Bom Bali dan Bom Mariot (INDRA MARTIAN PERMANA, 2019).

Pada tahun 2009, sejumlah kelompok milisi yang merupakan afiliasi dari JAT dan beberapa kelompok lainnya diduga berencana untuk mendirikan sebuah negara Islam di Indonesia. Yang mana, misi tersebut coba mereka realisasikan dengan mengadakan latihan militer bagi para anggota mereka yang berlokasi di Aceh untuk mengibarkan peperangan dengan pemerintah Indonesia. Namun, pada tahun 2010 pelatihan militer tersebut dapat dicitum dan dibongkar oleh polisi serta menjadikan Abu Bakar Ba'asyir

sebagai tersangka, yang mendanai dan dalang dari pelatihan militer tersebut. Tak semua milisi yang terlibat dalam pelatihan tersebut, yang mana beberapa anggota berhasil meloloskan diri dari kejaran polisi dan disinyalir membuat kelompok-kelompok teroris lain dan terhubung satu dan lainnya. Seorang pimpinan JI yakni Abu Tholut datang ke Poso dan berencana untuk menjadikan Poso sebagai markas dari Negara Islam. Dan pada akhirnya Santoso dan para rekannya berhasil mengumpulkan senjata dan membuat Gunung Mauro, Tambarana, Poso, menjadi tempat pelatihan militer mereka (Hakim, Rakhmat Nur, 2021).

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

Bagaimana efektifitas dari kebijakan perang melawan terorisme di Indonesia pada kelompok Mujahidin Indonesia Timur pada tahun 2015-2016?

## **1.3. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis efektifitas dari pengaplikasian kebijakan perang melawan teror di Indonesia pada kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur
- b. Untuk mengetahui bagaimana strategi Indonesia melawan teror yang disebarkan oleh kelompok Mujahidin Indonesia Timur
- c. Untuk mengetahui apakah operasi yang dilakukan pemerintah sudah berjalan dengan baik atau tidak

d. Untuk mengetahui keberhasilan program kontra-terorisme yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia

#### **1.4. SIGNIFIKANSI PENELITIAN**

Tak menunggu lama, segera setelah peristiwa serangan teroris di New York World Trade Center dan Pentagon pada tahun 2001, Pemerintahan Amerika Serikat pada saat itu mengkhawatirkan akan adanya serangan susulan yang dilancarkan baik untuk diri mereka sendiri ataupun dibelahan dunia lain. Maka dari itu, Amerika Serikat merasa bertanggung jawab untuk mencegah serangan susulan yang disusul dengan tindakan mereka yang terkesan dibawah ancaman yang akan segera terjadi dan dalam waktu yang singkat. Operasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat seperti menggulingkan rezim Taliban, melenyapkan Al-Qaeda, dan menangkap serta membunuh pendukung 9/11 yang dinyatakan sebagai perang terhadap terorisme sudah mendunia sejak saat itu (Thimm, 2018). Maka, kebijakan yang diambil oleh Amerika Serikat ini adalah sebuah kebijakan yang dapat mempengaruhi tatanan dunia. Yang mana, kebijakan ini juga berpengaruh di Indonesia, yang pastinya juga memiliki sejarah serangan teroris di negara ini sendiri. Oleh sebab itu, pada tulisan ini penulis akan memperlihatkan bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani teroris yang ada di negaranya dengan struktur dan kerangka tindakan yang ada dari kebijakan war on teror yang dibuat oleh Amerika Serikat tersebut.

## **1.5. CAKUPAN PENELITIAN**

Penelitian ini akan berfokus pada kelompok teroris MIT atau Mujahidin Indonesia Timur yang ada di Poso dengan serangan-serangan terror dan kebijakan pemerintah untuk memerangi kelompok ini. Penelitian hanya akan berfokus pada kontra-terorisme yang dilakukan oleh pemerintah kepada kelompok Mujahidin Indonesia Timur. Program-program pemerintah Indonesia dalam melawan kelompok Mujahidin Indonesia Timur akan dilihat efektivitas nya. Yang mana institusi pemerintah yang ikut serta dalam program nya untuk memerangi kelompok Mujahidin Indonesia Timur akan ditelaah.

## **1.6. TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam penelitian ini, penulis akan mengangkat sebuah tulisan yang ditulis oleh Vinsensio Dugis (2008), yang menuliskan bahwa minimnya ‘kesepakatan’ tentang defensisi dari terorisme itu sendiri yang menjadikan isu terorisme menjadi sebuah topic yang selalu dapat diperdebatkan lagi atas aktor yang diduga sebagai teroris tersebut. Walaupun peristiwa 9/11 seperti memunculkan sebuah ‘paradigma’ baru, tetapi sejatinya teror bukanlah sesuatu yang baru muncul di dunia karena pada dasarnya teror sudah ada sejak dahulu. Tetapi, aksi teror yang terjadi setelah 9/11 adalah fenomena dengan titik dimensi baru, yang didalamnya berelemen kuat dengan isu agama, yang aktornya bukan negara dan secara substansial mengubah isu, struktur dan tatanan internasional. Bentuk terorisme baru ini merupakan mutasi dari bentuk terorisme yang lama, dari yang bersifat statis, homogeny, relative terduga, hirarkikal dan tidak mudah berubah, yang menjadi bersifat dinamis, sulit diduga, jaringan luas, dan dapat menyesuaikan diri (Dugis, 2008).

Pada tulisan ini, penulis dapat melihat bagaimana terorisme yang ada pada masa sekarang ini.

Selanjutnya, penulis akan menghadirkan tulisan yang membahas tentang bagaimana sebenarnya MIT ini berdiri dan bagaimana latar belakang dari kelompok ini. Permana (2020), kelompok Santoso ini berakar dari kelompok dari luar Poso itu sendiri yang tergabung dalam organisasi JI atau Jamaah Islamiyah, JAT atau Jamaah Anshorus Tauhid, kelompok Bima yang merupakan eks ponpes Umar Bin Khattab dan diafiliasi oleh MIT atau Mujahidin Indonesia Timur. Kelompok ini sangat eksis, karena pada dasarnya masyarakat Poso sendiri menyambut baik kelompok ini, yang ditandai dengan diangkatnya Santoso alias Abu Wardah yang merupakan pemuda lokal asal desa Kalora Poso Pesisir Utara menjadi panglima MIT. Paham yang dibawa mereka juga berciri khas senang mengkafirkan orang lain walaupun dengan agama yang sama tetapi dengan pemahaman yang berbeda dengan mereka (Mohamad Didi Permana, 2020). Tulisan ini dapat menunjukkan dari mana asal anggota kelompok MIT ini dan memperlihatkan bagaimana kelompok ini terbentuk.

Setelah itu, penulis juga mengangkat sebuah tulisan yang menjabarkan motif yang melatarbelakangi para anggota teroris melakukan aksi teror yang dilakukan. Mubarak (2015) menuliskan bahwa motif yang melatarbelakangi aksi teror yang dilakukan di tanah air dapat dilihat dari dua aspek. Yang pertama, adalah alasan-alasan yang telah dijabarkan oleh para pelaku itu sendiri dan yang kedua dengan menggunakan pendekatan akademis melalui beberapa teori sosial. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Ali Imran yang tergabung dalam serangan Bom Bali, alasan nya melakukan serangan teror tersebut yang pertama karena tidak puas dengan pemerintahan yang ada, yang kedua tidak diberlakukan

nya Syariat Islam secara menyeluruh, yang ketiga berharap terbukanya *jihad fi sabilillah*, yang keempat melaksanakan kewajiban untuk berjihad dan yang kelima untuk membalas kaum kafir. Sedangkan menggunakan pendekatan akademis, maka kita akan melihat aspek terbesar dari pendekatan ekonomi politik yang menekankan marginaliasi ekonomi dan deprivasi sebagai faktor utama (Mubarak, 2015). Pada tulisan ini memperlihatkan contoh motif dari salah seorang pelaku teror terbesar yang pernah terjadi di Indonesia.

Selanjutnya, penulis akan mengutip tulisan yang menjelaskan tentang bagaimana kelompok Mujahidin Indonesia Timur dapat dikategorikan sebagai kelompok terorisme. Pabyantara (2018), menyatakan bahwa kelompok Mujahidin Indonesia Timur sudah dianggap teroris oleh negara, yang mana artinya gerakan mereka tidak dapat dianggap sebagai gerilya ataupun pejuang kemerdekaan. Walaupun gerakan gerilya sama dengan aksi terorisme yang sama-sama melibatkan kekerasan, tetapi gerilya sejatinya akan menargetkan para kombatan ataupun pasukan tempur musuh dan menghindari menyentuh ranah sipil ataupun publik. Maka, gerilyawan tidak akan melakukan perusakan, intimidasi, dan kekerasan-kekerasan lain yang melibatkan warga sipil untuk kepentingan mereka. Berbeda dengan terorisme yang tidak akan benar-benar memilih target operasi mereka dan akan menyasar siapa saja yang mengganggu dan menghalangi apa yang mereka inginkan. Oleh sebab itu, walaupun MIT terlihat memperjuangkan negara yang ingin mereka bentuk sendiri di tanah Indonesia dengan cara yang sama dengan gerilyawan lakukan, terdapat perbedaan signifikan atas aksi yang mereka lakukan (Pabyantara, 2018). Tulisan ini memperlihatkan bahwa kelompok Mujahidin Indonesia

Timur bukan lagi kelompok separatis ataupun gerilyawan yang ingin memperjuangkan hak dan tuntutan mereka.

Terakhir, penulis juga mengambil sebuah tulisan yang menjelaskan bagaimana serangan teror yang dilakukan oleh MIT. Pramono (2016), menuliskan insiden penembakan yang dilakukan oleh kelompok MIT yang dilakukan oleh tiga orang yang membuat Palu menjadi mencekam setelah ketiga penembak beraksi dan aksi ini menjadi monument perang pertama yang ditabuh oleh Santoso. Insiden tersebut adalah tembakan kepada dua orang polisi yaitu Yudistira Pranara dan Andi Irbar Prawiro yang ditembak di depan Bank BCA Palu pada pukul 11.00 WIT sebanyak tiga kali dengan peluru caliber 5,56 mm. Momen itupun membuat kepala BNPT pada saat itu, yaitu Komisaris Jendral Tito Karnavian angkat suara dan menyatakan tidak percaya bahwa Santoso akan menjadi ancaman yang menakutkan seperti ini, dikarenakan menurutnya Santoso bukanlah seorang ideolog dan bukan ahli strategi yang baik, yang mana Tito pernah bertemu dengan Santoso pada 2005. Tapi dari serangan tersebut, tak butuh waktu lama polisi dapat menangkap salah satu penembak yang tergabung dalam aksi teror tersebut, yaitu Aryanto Haluta (FX. Richo Pramono, 2016). Tulisan ini menunjukkan aksi pertama kali yang dilakukan oleh kelompok MIT yang menargetkan dua orang anggota polisi di Palu.

## **1.7. LANDASAN TEORI/KONSEP/MODEL**

Pada penelitian ini, penulis akan meneliti penelitian ini dengan sebuah konsep yang selalu dipakai untuk memerangi tindak kejahatan terorisme. Penulis mengambil konsep *kontra-terorisme* yang dipaparkan oleh Said Nursi. Yang mana, Said Nursi menyatakan bahwa konsep kontra-terorisme adalah sebuah upaya untuk menanggulangi

gangguan terror yang dilancarkan oleh para kelompok teroris, dalam tulisan ini adalah kelompok Mujahidin Indonesia Timur. Semua bentuk aksi teror yang dilakukan oleh kelompok teroris yang bertujuan untuk menghancurkan kestabilan di masyarakat akan diupayakan untuk dihapuskan (Faiz, 2017).

Konsep ini sangat relevan untuk dipakai saat menganalisis penelitian ini, karena tujuan dari penelitian ini adalah mencari efektivitas dari kebijakan yang dikeluarkan dan dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi teroris di Indonesia. Jadi, pada tulisan ini penulis akan melihat bagaimana efektivitas kebijakan pemerintah Indonesia untuk menanggulangi aksi teror yang disebabkan oleh kelompok Mujahidin Indonesia Timur. Program-program pemerintah Indonesia yang telah dipaparkan dengan berbagai peraturan dan institusi untuk memerangi pemerintah akan dianalisis dengan konsep *kontra-terorisme* ini. Sehingga nantinya, penulis dapat menyimpulkan dan mendapatkn jawaban dari rumusan masalah pada penelitian ini.

## **1.8. METODE PENELITIAN**

### **1.8.1 JENIS PENELITIAN**

Terlihat bahwa penelitian yang dilakukan dengan memanfaatkan data-data yang ada dan sudah tersedia dibuku ataupun jurnal online, maka penulis disini memutuskan untuk menggunakan jenis penelitian kualitatif. Analisis deskriptif dengan mengolah data-data yang didapat dari berbagai macam sumber yang berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dirancang oleh penulis dan data-data yang ada diharapkan dapat menjawab rumusan masalah tersebut.

### **1.8.2 SUBJEK DAN OBJEK PENELITIAN**

Subjek dari penelitian yang dilakukan dalam tulisan ini adalah sebuah kelompok radikal ekstrimis yaitu MIT. Yang mana, disini penulis akan mencoba untuk membedah bagaimana kelompok MIT ini dapat menjadi ancaman di Indonesia dan bagaimana negara menanggapi serangan teror yang dilakukan oleh kelompok ini. Pemerintahan negara Republik Indonesia menjadi objek dari penelitian ini, yang menjadi penanggung jawab dari serangan teror yang dilakukan oleh kelompok MIT ini dikarenakan tempat teror yang dilakukan adalah teritori dari negara Indonesia.

### **1.8.3 METODE PENGUMPULAN DATA**

Pengumpulan data untuk kepentingan analisis pada tulisan ini adalah dengan cara pengumpulan data pustaka. Metode ini akan diterapkan dengan cara menganalisis data-data dari membaca jurnal, buku, laporan ataupun berita yang terkait dengan rumusan masalah. Lalu, dengan metode ini penulis mengharapkan dapat menjawab dan menjabarkan rumusan masalah yang ada.

### **1.8.4 PROSES PENELITIAN**

Proses penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah dengan cara membagi dua jenis data yang ada, yakni data primer dan data sekunder. Pada data primer penulis akan mengklasifikasikan sebagai jurnal yang berasal dari laporan serta kalkulasi para ahli yang mempelajari bidang ini. Dan data sekunder, bagi penulis adalah berita-berita yang sebenarnya terjadi dilapangan. Berita digunakan sebagai data sekunder karena berita tergantung dengan media yang mengangkat nya, sehingga berbeda media bisa jadi berbeda pula isi beritanya.

## **BAB II**

### **Mujahidin Indonesia Timur, Serangan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur Dan Posisi Indonesia Dalam Program Melawan Terorisme**

#### **2.1 Mujahidin Indonesia Timur (MIT)**

Mujahidin Indonesia Timur atau dikenal juga dengan nama MIT adalah sebuah kelompok terorisme yang ada di Indonesia. Yang mana kelompok ini adalah kelompok terorisme yang berbaiat kepada jaringan terorisme internasional yaitu ISIS, yang mana kelompok ini awalnya dipimpin oleh Santoso atau Abu Wardah. Kelompok Santoso ini awalnya melakukan sebuah teror yakni melakukan aksi penembakan terhadap anggota Polri di depan kantor Bank BCA di Palu, Sulawesi Tengah (Erwin Dariyanto , 2016). Santoso dan kelompoknya juga melakukan serangan ke Polsek Palu pada Mei 2011 yang mana mereka berhasil membobol beberapa sel yang diperuntukan mencari anggota baru yang bisa direkrut. Kelompok ini juga melakukan pencurian untuk mendanai aksi dan aktivitas mereka, serta membiayai hidup dari janda teroris yang telah tewas dari operasi yang dilakukan oleh tim Tinombala (Dio Pratama, 2016).

Kelompok MIT ini sebenarnya berasal dari ambisi dari jaringan kelompok Jemaah Islamiyah (JI) yang ingin mendirikan sebuah negara Islam di Poso. Ide tersebut sempat digaungkan oleh mantan pentolan dari JI dan juga pengurus dari JAT yakni Abu Tholut bersama Santoso alias Abu Wardah Abu Wardah dan Sutomo bin Sudarto alias Mohammad Yasin alias Ustaz Yasin pada tahun 2009. Lalu, mereka setuju untuk menyiapkan basis daerah di Poso sebagai tempat untuk pelatihan militer serta menciptakan kader-kader yang akan berjuang untuk negara Islam yang mereka impikan.

Santoso atau Abu Wardah dipilih menjadi kepala bagian pelatihan militer di negara Islam yang akan dibangun oleh JAT ini dan Ustadz Yasin sebagai duta organisasi JAT Poso ini. Diawali dengan pengumpulan senjata dan mencari tempat latihan untuk militer lalu, pada 2010, Santoso dan kawan-kawan berhasil membeli beberapa senjata dan menemukan tempat latihan militer di kawasan Gunung Mauro Tambarana, Poso Pesisir (Mbai, 2014).

Awalnya kelompok ini bernama JAT Poso yang kemudian berganti nama menjadi MIT atau Mujahidin Indonesia Timur. Kelompok ini sejatinya sangat membenci polisi, pasalnya polisi adalah pemeran utama dalam aksi menggagalkan usaha mereka saat ingin membuat negara Islam di Aceh dan mereka didorong untuk membunuh Polisi. Oleh karena itu, MIT kerap melakukan aksi teror yang mereka lakukan ditujukan kepada polisi. Banyak aksi yang mereka lakukan untuk menyoroti polisi seperti membunuh polisi, penembakan terhadap polisi, peledakan bom di kantor polisi, dll. Dikarenakan aksi mereka yang selalu menyoroti polisi, mereka menjadi sasaran utama dari polisi yang ada di Poso. (Solahudin, 2014).

Anggota dari kelompok MIT ini tidak hanya berasal dari Poso, melainkan berasal dari berbagai tempat di Indonesia. Yang mana, anggota MIT juga berasal dari simpatisan jihadis dari kota-kota lain yang sejalan dengan ideologi mereka seperti dari Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat dan seluruh Jawa (Solahudin, 2014). Tak hanya itu, anggota dari MIT ini juga ada yang berasal dari China, yang mana mereka adalah etnik Uighur yang berasal dari Xianjiang di China dan berjumlah 10 orang. Dari 10 orang tersebut, 4 dari mereka telah berhasil ditangkap saat di perjalanan mereka dari Makassar menuju Poso. Lalu, 5 orang telah tewas, yang mana 2 orang telah tewas ditembak saat operasi yang dijalankan oleh pasukan Tinombala, satu

ditemukan tewas disebuah sungai di Poso dan dua orang lainnya tewas ditembak polisi (BBCNEWS, 2016).

Pada bulan-bulan akhir dari tahun 2012, JAT cabang Poso merayakan sebuah momentum pembentukan Mujahidin Indonesia Timur atau MIT. Kelompok ini tidak dapat disepelekan, pasalnya walaupun konflik yang dibuat oleh kelompok ini tidak tergolong sebagai konflik yang besar dibandingkan oleh kelompok lain, ada 4 alasan penting yang menguatkan bahwa pemerintah harus memantau kelompok ini secara ketat. Yang pertama, MIT adalah salah satu kelompok yang mewakili dari beberapa jaringan militan nasionalis aktif di Indonesia yang berfokus di Sulawesi dan Jawa. Yang kedua, anggota dari kelompok ini bukanlah rekrutan baru yang tidak berpengalaman dalam bidangnya, melainkan veteran tempur dari berbagai kelompok sebelumnya. Yang ketiga, Poso yang menjadi tempat konflik vertical agama yang membuatnya dapat dengan mudah mendapatkan banyak dukungan masyarakat. Dan yang keempat bait yang dilakukan oleh Santoso kepada ISIS dapat menjadikan kelompok ini kuat (Galamas, 2015).

Santoso yang menjadi ketua pertama di MIT pun adalah orang yang terlatih, yang mana Santoso memiliki catatan kriminal sebelum menjadi petinggi di MIT. Sebelum di MIT, Santoso pernah berurusan langsung dengan polisi, yakni saat dia termasuk kedalam tersangka penembakan mobil box di kecamatan Suasu, kabupaten Parigi Moutong. Maka, sebenarnya alasan dari kelompok ini terlihat kuat adalah karena rata-rata anggota nya adalah orang yang memiliki pengalaman. Kekecewaan terhadap keadaan juga menjadi alasan yang kuat bagi Santoso untuk menjadi penyebar teror di Poso. Pasalnya, Santoso juga terlibat langsung atas peristiwa Poso pada tahun 1998-2001, yang mana ada kemungkinan bahwa dia termasuk korban disana. Deklarasi Malino yang menajadi ujung

tombak perdamaian dari peristiwa Poso tersebut juga sering disalah artikan oleh kebanyakan orang, yang mana menjadikannya sarana impunitas bagi para pelaku kejahatan di Poso (Ahmat, 2021).

Sebelum ke Poso, Santoso juga pernah tergabung kedalam militan di Aceh yang sudah dibubarkan oleh polisi dan aparat yang berwenang. Tetapi, bukan karena diusir dan terpaksa untuk pindah ke Poso, Santoso sendiri memang berasal dari Poso dan Poso adalah rumahnya. Beliau juga sempat melakukan perjalanan ke Afghanistan untuk pelatihan jihad disana, yang dibimbing oleh ulama jihad Islam Mohammad Tahir Al-Barqawi yakni seorang ulama jihad Yordania-Palestina. Dari sanalah cikal bakal pemikiran Santoso yang ingin menyerang musuh yang dekat dan pemerintah yang mereka anggap murtad dan mendirikan negara Islam sendiri di Poso. Beliau juga sempat dideradikalisasi oleh pemerintah dengan diberi uang hibah untuk mendirikan usaha kecil, walaupun usaha tersebut gagal. Santoso malah menggunakan uang tersebut untuk membayar keperluan dan para pengikutnya agar tetap setia dijalan mereka (Henshaw, 2015).

Ideologi MIT yang sejalan dengan ISIS atau NIIS, yakni *takfir* yang mengkafirkan atau menganggap orang lain kafir jika orang tersebut tidak sejalan dengan ideologi keagamaan yang mereka percayai. Hal ini menjadikan MIT adalah salah satu kelompok yang terjaring dalam jaringan terorisme global. Ideologi ini dianggap sangat berbahaya, dikarenakan mereka yang menganut ideologi ini dapat membunuh siapa saja yang menentang dengan ideologi mereka. MIT cenderung melihat bagaimana penderitaan umat Islam yang mereka anggap dibawah tekanan dikarenakan tidak diakuinya ideologi mereka. Hal ini juga dapat memicu himpunan energi dari simpatisan yang merasa harus

berjihad secara cepat dan massif. Oleh sebab itu, MIT menunjukkan dukungan mereka kepada NIIS secara eksplisit dan terang-terangan. Dibuktikan dengan baiat Santoso kepada ISIS atau NIIS bahwa MIT adalah sekutu dan sejalan dengan paham mereka (Hilmi, 2014).

Pemikiran radikal ini sepertinya tidak akan mudah mereda ataupun hilang di bumi Indonesia. Pasalnya, banyak faktor yang menguatkan pemikiran ini akan tetap ada, yakni seperti faktor sejarah, agama, politik pun ikut serta dalam menguatkan ideologi ekstrim yang sama seperti yang dimiliki oleh kelompok MIT ini. Walaupun nantinya akan muncul kelompok-kelompok baru yang akan muncul nanti akan berbeda dari cara dan aksi yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Mengingat juga konfrontasi antara Islam dan Kristen adalah faktor yang besar untuk dipertimbangkan ketika mencoba melihat kemunculan kelompok yang sama seperti MIT ini, yang mana mengatasnamakan jihad sebagai alasan untuk melakukan kekerasan. Konflik dari luar negeri juga dapat memicu kelompok ekstrimis seperti MIT ini semakin besar. Seperti halnya MIT sendiri juga telah berbaiat kepada kelompok ISIS atau NIIS yang notabene nya merupakan kelompok teroris global dan terhubung secara langsung ke MIT itu sendiri (Galamas, 2015).

Secara tidak langsung dukungan untuk MIT dan kelompok-kelompok teroris lainnya sangat besar di Indonesia, yang mana terjadi disebabkan oleh ideologi *takrir* tersebut. Hal ini dapat dilihat pada peristiwa teror bom di Thamrin, yang mana statement tersebut berasal dari pantauan terhadap sosial media twitter. Banyak masyarakat seolah mendukung aksi teror tersebut karena menganggap aksi tersebut memang ditujukan untuk orang kafir. Maka, ideologi ini sangat berbahaya dan sangat berpotensi dalam menyebarkan paham radikal ini di Indonesia. Kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal

yang dianggap diluar logika juga menjadi pemicu tumbuhnya paham radikalisme di Indonesia (Sumandoyo, 2016).

Di era Globalisasi ini, jaringan terorisme juga tidak ketinggalan untuk memanfaatkannya, yang mana MIT dapat menjadi puncak gunung es dari kekuatan terorisme yang berjangkauan global. Yang mana, kelompok-kelompok ini secara tidak langsung memiliki keterikatan karena solidaritas dan atas nama Islam. Sehingga, dimanapun serangan teroris yang terjadi, memicu sebuah resonansi yang dapat merangsang nafsu serta memotivasi kelompok lain yang sejalan dengan mereka yang ada di Indonesia. Sehingga, terjadilah aksi dan tindakan dari banyak kelompok teroris dengan ideologi yang sama untuk merespon sebagai akuisisi tekad mereka dalam jaringan teroris dengan ideologi yang sama dengan mereka. Ditambah lagi situasi politik Indonesia yang membuat ideologi mereka semakin kuat dan aksi mereka pun semakin parah. Karena para elit politik dan negara banyak menggunakan agama sebagai senjata politik mereka serta banyaknya bentrokan antara pemerintah dan kaum agamais (Sahasrad, 2016).

MIT juga memiliki akses dengan kepemimpinan langsung ISIS yang ada di Suriah. Yang mana hal itu terjadi karena Abu Jandal atau Salim Mubarak At-Tamimi dan para jihadis lainnya yang merupakan jihadis Indonesia yang ada di Suriah. Para jihadis ini merupakan penyuplai senjata, logistic maupun orang-orang yang akan menjadi anggota kelompok MIT ini. MIT mendapatkan pendanaan senjata, logistic ataupun anggota yang dapat direkrut ini dari jaringan Bahrumsyah yang merupakan seorang ketua dari pasukan militer Asia Tenggara yang juga berbaiat kepada ISIS atau NIIS yang dikenal dengan kelompok Katibah Nusantara (Ahmed Mahmud, 2016). Karena dukungan ini, pada Januari 2016, MIT memiliki setidaknya 45 anggota yang mana bertambah cukup

banyak dari tahun sebelumnya. Hal ini diketahui setelah polisi meliris nama-nama baru yang diduga terlibat dan merupakan anggota dari teroris MIT yang ada di Poso (Tempo.co, 2016).

## **2.2 Aksi teror yang dilakukan oleh MIT dibawah kepemimpinan Santoso (Mujahidin Indonesia Timur)**

Pada tahun 2012, Santoso dan kelompoknya telah mengklaim beberapa serangan yang mereka lakukan. Lalu, pada Desember 2012 mendeklarasikan bahwa MIT bukanlah pecahan atau anggota dari kelompok manapun, yang berarti mereka mendeklarasikan bahwa MIT adalah kelompok yang independen. Kelompok ini juga mendeklarasikan kebencian nya kepada detasemen 88 atau yang biasa dikenal dengan densus 88. Disebuah video Youtube yang diupload pada tahun 2013 dan 2014 yang bersubtitle bahasa Inggris itu , mereka mendeklarasikan perang kepada tim Densus 88. Mereka juga mengklaim bom bunuh diri yang terjadi pada 3 Juni yang ditargetkan ke salah satu kantor polisi di Poso. Serta sebuah video yang diupload di Youtube pada 1 July 2014, yang mana kelompok MIT mendeklarasikan bahwa mereka berbaiat kepada Abu Bakr Al-Baghdadi yaitu pemimpin dari ISIS (Sugara, 2014).

Kekejaman kelompok Mujahidin Indonesia Timur ini tidak hanya ditujukan kepada musuh mereka yaitu aparat Kepolisian Indonesia. Tetapi, kelompok ini juga akan memburu siapa saja yang memiliki hubungan atau yang memilih untuk memihak kepada Kepolisian. Seperti contohnya sebuah pengakuan dari kelompok Mujahidin Indonesia timur yang telah membunuh seorang warga desa yang mereka anggap telah bersekutu dengan polisi. Pasalnya, Fadil seorang warga yang sudah berumur 50 tahun telah memberikan informasi terkait kelompok ini kepada Densus 88. Kelompok ini mengklaim

bahwa informasi yang diberikan Fadil mengakibatkan Densus 88 dapat melakukan serangan kepada mereka dan mengklaim bahwa dua dari anggota mereka telah terbunuh pada penyerangan tersebut. Menurut polisi, lima orang anggota MIT yang beberapa diantaranya memakai penutup wajah berwarna hitam telah membunuh Fadil dengan menggorok lehernya hingga putus (DW, 2014).

Tak sampai situ, serangan-serangan yang dilakukan oleh kelompok Mujahidin Indonesia Timur atau MIT ini tergolong banyak terhitung dari tahun 2011-2016. Serangan-serangan tersebut adalah:

Tahun	Aksi Teror
2011	Pada tanggal 22 Februari 2011 terjadi peledakan bom dirumah warga di Korowouw
	Pada tanggal 25 mei 2011 terjadi penembakan anggota Polri didepan Bank BCA Palu
2012	Pada tanggal 27 Agustus terjadi penembakan terhadap Noldy Ombolado
	Pada tanggal 3 November terjadi kontak yang menangkap Kholid Tobingo
	Pada tanggal 7 November terjadi penembakan Hasman Sao di Desa Masani
	Pada tanggal 9 November peledakan bom (kawua) dirumah Okrifel Mamuja

	<p>Pada tanggal 15 November terjadi penyerangan ke Mapolsek Poso Pesisir Utara</p>
	<p>Pada tanggal 16 November terjadi pembunuhan 2 anggota Polri, yakni Andi Sapa dan Sudirman</p>
	<p>Pada tanggal 22 November terjadi peledakan bom di pos Lantas Smaker</p>
	<p>Pada tanggal 20 Desember terjadi penyerangan kepada Patroli Brimob di Kalora</p>
	<p>Pada tanggal 25 Desember terjadi bom di pos Natal pasar sentral Poso</p>
2013	<p>Temuan bahan bom Urea Nitrat sebanyak 7 jerigen atau setara dengan 30 liter</p>
	<p>Pada tanggal 2 Maret temuan bom pipa di jalan P. Irian Poso</p>
	<p>Pada tanggal 14 Mei terjadi ledakan bom di Mapolres Palu</p>
	<p>Pada tanggal 18 Mei terjadi ledakan bom di Mapolsek Palu Timur</p>
	<p>Pada tanggal 3 Juni terjadi bom bunuh diri di Polres Poso</p>
2014	<p>Pada tanggal 24 Februari terjadi ledakan bom didepan Pos Polmas Pantango Lembah</p> <p>(Bom tangki semprot Hama)</p>
	<p>Pada tanggal 25 Februari terjadi ledakan bom didepan Pos Polmas Pantango Lembah</p>

	Pada tanggal 10 Juni terjadi penembakan di Mapolsek Poso Pesisir Utara
	Pada tanggal 18 September terjadi pembunuhan warga di Taunca
	Pada tanggal 9 Oktober terjadi Bom di Dewua
	Pada tanggal 7 November terjadi penyerangan mobil taktis Brimob di Poso Pesisir Selatan
	Pada tanggal 15 Desember terjadi penculikan 2 warga di Sedoa dan 3 warga di Tamadue
2015	Pada tanggal 16 Januari terjadi pembunuhan 3 warga di Taunca dengan cara dipenggal
	Pada tanggal 16 dan 17 September terjadi pembunuhan 3 warga Sausu dengan cara penggal
	Pada tanggal 17 Agustus terjadi penembakan pada Iptu Bryan T
	Pada tanggal 29 November penembakan Serma Zainudin
	Pada tanggal 9 Februari terjadi penembakan kepada Brigadir Wahyudi Saputra di Sanginora

(Erwin Dariyanto , 2016)

### **2.3 Posisi Indonesia Pada Program Perang Melawan Terorisme**

Wacana War on Terror yang dibangun oleh Amerika Serikat menggerakkan media organisasi-organisasi internasional serta negara-negara lainnya untuk membentuk sebuah system dan aturan-aturan yang akan memerangi terorisme. Dibuktikan dengan ikut andilnya PBB dalam menguatkan kebijakan ini dengan membuat resolusi-resolusi yakni resolusi 1368, resolusi 1377 dan resolusi 1373. Maka, kebijakan War On Terror yang diusung oleh AS ini seperti mendapatkan legitimasi bagi AS dalam misi mereka memerangi terorisme. Negara-negara Eropa juga mendukung langkah ini, yang mana dibuktikan dengan dibuatnya dua perjanjian yang memberikan kedua belah pihak otoritas dalam berbagi informasi strategis dan pribadi. Maka dari itu, kebijakan ini seakan menjadi definisi dari identitas dari negara-negara lainnya dan menjadi identitas serta kepentingan bersama. Lalu, dari sini terbentuklah stigma bahwa dunia sedang berperang dengan terorisme (Kedang, 2017).

Indonesia, pada saat kejadian 9/11 dipimpin oleh Presiden pertama perempuan di Indonesia, yakni Ibu Megawati Soekarno Putri, yang mana sepuluh hari setelah kejadian tersebut Presiden Indonesia kala itu mengunjungi Washington. Disaat kunjungannya, Presiden Indonesia berpidato di Usindo Gala Dinner di Washington DC. Isi dari pidato tersebut, Ibu Megawati Soekarno Putri menyatakan bahwa pemerintah dan rakyat Indonesia menunjukkan simpati dan dukungan kepada Amerika Serikat pada masa sulit mereka pasca peristiwa 9/11 tersebut. Tak hanya itu, beliau juga menyatakan bahwa Indonesia mengutuk keras terorisme dan segala bentuk manifestasi dari aksi yang mereka lakukan. Pada pidato tersebut, beliau juga menyatakan bahwa Indonesia siap bekerjasama dengan AS dan negara-negara lain yang mendukung AS dalam misi penanggulangan aksi

terorisme di dunia seperti kebijakan War On Teror yang mereka kampanyekan. Dalam pidato tersebut, Beliau juga menyebutkan bahwa Indonesia juga sedang menghadapi masalah separatisme yang terjadi di Aceh, Irian Jaya dan konflik sosial yang terjadi di Maluku, Kalimantan, serta Sulawesi (Siregar, 2001).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan Pemerintah Indonesia cenderung represif untuk mendukung Global War On Teror ini, yang mana ada empat faktor. Faktor pertama adalah bantuan-bantuan yang ditawarkan oleh negara-negara lain yang mendukung kebijakan ini, yang mana bantuan-bantuan materi tersebut akan menguntungkan Pemerintah Indonesia seperti bantuan dari Australia dan Amerika Serikat. Faktor kedua adalah terkait keanggotaan Indonesia di PBB, dalam hal ini sebagai anggota dari PBB Indonesia harus ikut mengikuti resolusi-resolusi yang telah dibuat oleh PBB. Faktor yang ketiga terkait kebijakan Global War On Teror ini sudah menjadi norma internasional karena dukungan-dukungan yang diberikan oleh banyak negara dan ketersediaan mereka untuk mendukung dan mengikuti kebijakan ini. Yang keempat adalah persepsi Indonesia atas terorisme itu sendiri yang berkembang atas pergaulan Indonesia di kancah internasional serta pengalaman Indonesia sendiri yang membentuk keyakinan bahwa kebijakan Global War On Teror ini penting bagi Indonesia (Wahono, 2019).

#### **2.4 Respon Pemerintah dalam menanggapi kelompok MIT**

Berawal dari kejadian 9 September 2001, isu terorisme menjadi isu yang hangat di kancah global. Pasca peristiwa yang menjadi ikon dari terorisme tersebut, konstelasi politik global didominasi oleh politik luar negeri unilateralisme AS dalam sebuah

kebijakan yaitu kebijakan Global War On Teror untuk memerangi terorisme. Dalam kampanyenya, AS membuat sebuah polarisasi tegas yakni dengan sebuah istilah “either you with us, or you with terrorist.” Lalu, dari kebijakan tersebut, AS memulai invasi mereka ke negara-negara yang mereka anggap sebagai sarang teroris yakni seperti negara Afghanistan pada tahun 2001 dan Irak pada tahun 2003. Pada saat itu, Indonesia memilih tidak mengikuti polarisasi dari kebijakan yang dibuat oleh AS tersebut, yang mana Indonesia tidak mengambil langkah untuk setuju atau tidak dengan kebijakan tersebut. Namun Indonesia berubah haluan menjadi mendukung gerakan dan kebijakan tersebut karena adanya dampak langsung dari terorisme di Indonesia pada tahun 2002, yaitu peristiwa Bom Bali pada tahun 2002 yang membuat Indonesia secara eksplisit terlibat dalam perang dunia melawan teroris (Pabyantara, 2018).

Banyaknya entitas militant yang hadir di Indonesia, mengadvokasi institusi tatanan Islam yang lebih fundamentalis terus tumbuh di Indonesia. Kelompok-kelompok fundamentalist ini disinyalir merupakan dalang dari serangan terhadap bar, panti pijat, ruang karaoke dan tempat perjudian di Jakarta. Hal itu disinyalir untuk menggaet orang-orang agar protes atas serangan yang dilakukan oleh AS kepada Afghanistan dan Irak terkait isu teroris serta isu kekerasan komunal dan agama di Sulawesi dan Maluku. Selain kelompok-kelompok tersebut, Indonesia juga harus menghadapi pemberontakan Islam yang mengakar di Aceh yang membuat pemerintah melancarkan serangan ke Aceh dan mengakibatkan 1000 kematian. Kebencian pun semakin bertambah walaupun presiden kala itu sudah berusaha untuk menyalurkan ekonomi yang adil kepada setiap daerah yang ada. Pasalnya, pemerintah sebenarnya tidak peka terhadap kebutuhan, keluhan dan hal yang membuat frustrasi pada masyarakat adat (Holt, 2005).

Gerakan yang membentuk MIT adalah gerakan yang dilakukan oleh Al-Qaeda dan ISIS, yang mana dapat kita lihat dari track record pemimpin awal dari kelompok ini. Pemerintah Indonesia sebagai komunitas yang memiliki wewenang untuk menindak lanjuti kasus teror ini harus melakukan intervensi dan memilih kebijakan apa yang akan diambil. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan Nasional Indonesia, yakni menjamin keamanan dan melindungi warga negaranya. Karena pada dasarnya, semakin besar kelompok teror melakukan aksinya, maka hal ini akan memperburuk keadaan Indonesia, yang mana dapat memicu peningkatan gerakan ekstrimis dan radikal yang pastinya akan meningkatkan teror kepada masyarakat. Hal lain yang dapat diperhatikan adalah meningkatnya jumlah anggota yang tergabung dalam kelompok penyebar teror tersebut dan jika dipandang lebih jauh maka negara akan kacau bahkan dapat hancur (Kushindarti, RESPONS PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN GERAKAN ISLAMIC STATE DI INDONESIA, 2017).

Ada beberapa faktor yang mendukung perkembangan pemikiran ekstrim yang dapat membuat gerakan teror di Indonesia. Salah satunya adalah paham Anti Barat bagi banyak warga Indonesia, yang mana mereka akan menganggap bahwa Barat telah menciptakan tirani terhadap negara Islam dan Muslim. Karena pada dasarnya, keseluruhan operasi kebijakan *war on terror* yang dilakukan oleh Amerika Serikat dilakukan di negara-negara Islam dan Muslim. Lalu, pemahaman atas Al-Quran dan Hadist juga menjadi kunci berkembangnya pemikiran ekstrim di Indonesia, yang mana pembahasan tentang jihad sering kali disalah artikan oleh banyak orang. Demokrasi di Indonesia yang memberikan kebebasan untuk berekspresi dan berkelompok juga menjadi sarana yang dapat dimanfaatkan oleh para ekstrimis ini (Kushindarti, Respons

Pemerintah Indonesia Dalam Menanggapi Perkembangan Islamic States di Indonesia, 2017).

Kelompok-kelompok yang menganut paham radikal dibangun atas dasar interpretasi Islam yang sempit dan dogmatis. Pemikiran radikal ini secara tidak langsung telah dibiarkan berkembang oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia karena tidak adanya penanganan langsung dari awal. Kelompok-kelompok radikal ini menekankan pemahaman Islam yang ketat, legalistic, dan eksklusif dan sudah berusaha dalam membagi masyarakat menjadi dua kategori, yakni Dar Al-Islam dan Dar Al-Harb. Kelompok-kelompok ini dapat menyebarkan paham yang mereka miliki di Indonesia dengan damai selama lebih dari satu decade. Maka dari itu, pakar berpendapat bahwa Indonesia seharusnya menindak tegas penyebaran paham radikal dari kelompok-kelompok yang berpaham radikal ini. Bahkan para pakar menyarankan agar Indonesia membuat kebijakan untuk menahan para simpatisan atas paham radikal ini, karena di Indonesia belum ada peraturan untuk penahanan kepada militant yang bahkan bepergian keluar negeri untuk pelatihan militer (Wanto, 2015).

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan statement bahwa Indonesia menolak keras setiap ideologi yang dibawa oleh kelompok militant IS atau Islamic State di negara Indonesia. Pemerintah juga menyatakan bahwa kelompok teror yang ingin mendirikan IS bukanlah semata-mata sebagai masalah agama, melainkan masalah ideologi. Yang mana ideologi yang diangkat sangat bertentangan dengan ideologi yang dianut oleh Indonesia saat ini, yakni ideologi Pancasila. Dari pertentangan ideologi ini, para ekstrimis yang ingin mendirikan IS dapat mengganggu stabilitas keamanan negara Indonesia. Maka dari itu, yang patut ditakutkan adalah penyebaran ideologinya, bukan penyebaran agamanya.

Ideologi tersebut harus dicegah, mengingat sudah ada bentuk dukungan oleh sejumlah warga Indonesia terhadap ideology yang dianut oleh ISIS, ditandai dengan aksi baiat beberapa kelompok ekstrimis kepada kelompok ISIS (BBCNEWS, 2014).

Sebelum Bom Bali terjadi pada tahun 2002, Indonesia sendiri belum memiliki regulasi khusus untuk menanggulangi terorisme di negaranya. Maka, seminggu setelah kejadian Bom Bali tersebut, pemerintah Indonesia mulai menerbitkan kebijakan nasional mengenai tindak pidana tentang terorisme. Yang mana hal tersebut diwujudkan dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang No.1 dan 2 Tahun 2002. Dalam Perppu tersebut, pemerintah menjabarkan bahwa “setiap tindakan dari seseorang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.” Lalu, Perppu tersebut disahkan menjadi UU No. 15 tahun 2003. Pada UU No.15 2003 tersebut dijabarkan bahwa ciri-ciri dari tindakan terorisme adalah dilakukan oleh kelompok tertentu, menggunakan kekerasan, menimbulkan korban masyarakat sipil yang bertujuan untuk mengintimidasi pemerintah (Obsatar Sinaga, 2018).

Ternyata ada beberapa isu yang tersebar bahwa teroris Santoso dan MIT merupakan buatan pemerintah Indonesia sendiri karena perburuan yang dilakukan sudah lama dan belum berhasil. Isu tersebut tercipta dengan perspektif bahwa Santoso sendiri sengaja dibiarkan agar proyek operasi tetap berjalan disana yang mana isu tersebut membandingkan dengan dengan DOM atau Daerah Operasi Militer di Aceh sebelumnya.

Lalu, Mantan kepala BNPT meluruskan isu-isu tersebut dengan cara mengklaim bahwa MIT dan Santoso memang benar adanya di Poso serta mengklaim akan menangkap Santoso dalam waktu dekat. Posisi dari kelompok Santoso dinyatakan sudah sangat terdesak karena desakan yang diberikan oleh pasukan Satgas Tinombala yang terus menyisir kelompok Santoso. Satgas Tinombala sendiri adalah gabungan dari TNI dan Kepolisian yang bertugas menangani dan membekuk kelompok MIT terutama Santoso (Arbi Sumandoyo, 2016).

Direktur Eksekutif Celebes Institute, Adriyani Badrah yang merupakan petinggi dari organisasi yang menelaah konflik yang terjadi di Poso meyakini bahwa operasi bersenjata yang diluncurkan oleh pemerintah tidak dapat memberikan jaminan berhentinya kekerasan. Beliau juga menyatakan bahwa faktanya ketakutan pada masyarakat cenderung meninggi. Hal yang akan sangat membantu memperbaiki kondisi yang ada adalah dengan cara rehabilitasi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Poso pascakonflik dan dengan banyak pihaklah yang akan membantu. Karena menurut beliau penerapan operasi tak berbanding lurus dengan upaya pemerintah dalam menghentikan lahirnya kader-kader baru yang akan meneruskan pemahaman radikalisme dan ekstrimisme yang menjadi kunci awal dari teroris itu sendiri. Pengamat teroris dari IAIN Palu juga menyetujui statement dari Adriyani Badrah tersebut. Menurut Muhammad Lukman satgas seharusnya tidak hanya focus kepada pemburuan jaringan teror tetapi juga harus memberikan focus kepada pemutusan jaringan nya (Keisyah Aprilia, 2020).

## **BAB. III**

### **Analisis Kebijakan Kontra Terorisme di Indonesia Kepada Kelompok Mujahidin Indonesia Timur**

#### **3. Kebijakan Kontra Terorisme Pemerintah Indonesia Dalam Upaya Melawan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur**

Pemerintah negara Indonesia sebagai pengatur dan pembuat kebijakan yang ada di Indonesia dalam segi apapun telah melakukan kontra terorisme atas tindakan kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur. Yang mana, Pemerintah Indonesia telah membentuk beberapa badan yang khusus untuk menangani terorisme di Indonesia. Badan-badan khusus tersebut dinamai sebagai BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) dan Densus 88 (Detasement Khusus 88). Kedua badan ini adalah ujung tombak bagi Pemerintah Indonesia dalam menangani kasus terorisme yang terjadi di Indonesia.

Setelah terjadinya Bom Bali yang pertama, Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yang mana PERPPU ini sebenarnya telah disusun sejak 1999-2000. Kemudian, Undang-Undang inipun digodok lagi menjadi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2002 dan Keputusan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Nomor 26/Menko/Polkam/11/2002 tentang Pembentukan Koordinator Desk Pemberantasan Terorisme. Karena pada dasarnya setelah terjadi Bom Bali I, Indonesia seakan sudah sadar atas bahaya nya ancaman dan aksi yang dilakukan oleh para terorisme yang ada di Indonesia, terlebih korban yang ada pada peristiwa tersebut adalah orang asing, maka Indonesia menjadi pusat perhatian dunia (M, 2012). Setelah dikeluarkan nya Undang-Undang dan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah

Indonesia setelah Bom Bali I, disini terlihat bahwa Indonesia mulai memperhatikan keamanan negaranya dari serangan terorisme. Yang mana, tindakan ini dapat dikatakan sebagai tindakan *kontra terorisme* dari Pemerintah Indonesia untuk menjamin keamanan yang ada di Indonesia.

Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Indonesia setelah terjadinya Bom Bali pada saat itu tidak terlalu mengagungkan aksi dari kontra-terorisme. Tetapi, pada masa itu Pemerintah Indonesia memilih untuk mengangkat wacana HAM sebagai pelopor dari kebijakan-kebijakan yang dibuat setelah terjadinya Bom Bali pertama tersebut. Hal itu terjadi karena kondisi politik yang ada di Indonesia, dimana pada saat itu, Indonesia baru keluar dari masa otoriter yang dipimpin oleh presiden sebelumnya, yakni Presiden Soeharto. Lalu, wacana HAM tampaknya lebih baik untuk digaungkan dengan proyeksi Pemerintah sebagai “berbeda dengan negara otoriter masa lalu” dan menyebutkan bahwa tindakan terorisme sebagai “kejahatan luarbiasa” dan “kejahatan terhadap kemanusiaan”. Setelah keberhasilan yang didapat oleh Pemerintah Indonesia pada masa itu, Indonesia mendapat keuntungan yang besar seperti mendapatkan bantuan dari negara lain untuk Kepolisian Indonesia dan larangan militer yang ada di Indonesia atas tragedi Santa Cruz dicabut (Wibisono, 2021). Maka dapat dilihat bahwa Indonesia akan lebih meningkatkan kebijakan untuk berperang dengan terorisme yang ada di Indonesia

Pemerintah Indonesia juga membuat sebuah detasement khusus untuk melawan terorisme yang terjadi di Indonesia, yakni Densus 88 yang dibentuk khusus dalam penanganan ancaman terorisme. Disini, Densus 88 dan para pejabat yang menangani keamanan negara berfokus untuk menangkap para teroris yang sekiranya dapat diadili di pengadilan. Bukan tanpa alasan, Pemerintah ingin mengadili para pelaku kejahatan

terorisme karena ingin menguak lebih lanjut akar dari permasalahan terorisme yang terjadi di Indonesia. Sehingga, pemerintah melakukan deradikalisasi dengan upaya melawan ideologi ekstrim yang ada pada diri mereka melalui pendekatan hati dan pikiran. Perlakuan ini dapat membantu Pemerintah dalam memerangi ideologi ekstrim yang ada pada para teroris yang berpikiran radikal yang masih berkeliaran diluar sana, yang mana hal itu diwujudkan dalam upaya pemerintah yang membantu para mantan jihadis dalam menerbitkan memoar dan buku untuk melawan aksi terorisme dan ideologi ekstrim para pelaku terorisme (Chavy, 2018).

Keberhasilan pemerintah Indonesia dalam menangani dan upayanya dalam pemberantasan terorisme dapat dilihat dari beberapa indicator. Indicator pertama adalah peraturan-peraturan dan Undang-Undang yang dipakai oleh pemerintah dalam menangani kasus terorisme itu sendiri, yang mana indicator pokok pemerintah dalam memerangi terorisme hadir seminggu setelah terjadinya bom Bali. Namun, produk hukum yang dibuat pemerintah dalam aksinya untuk memberantas terorisme menyisakan masalah yuridis yang berkaitan dengan pelanggaran atas asas Non-Retroaktif yang membuktikan bahwa instrument hukum negara sangat perlu untuk dikaji ulang dengan pemahaman yang mendalam. Indicator kedua adalah jumlah keberhasilan pemerintah dalam misinya untuk menangkap pelaku teror yang cukup tinggi dan upaya aparat untuk mengungkap kasus-kasus terorisme yang terjadi di Indonesia. Yang ketiga adalah jumlah insiden yang terjadi di Indonesia setelah pemerintah turun tangan dan terjun langsung untuk memberantas aksi teror yang mana aksi-aksi teror tersebut dapat dihitung setelah terjadinya Bom Bali pada tahun 2002 (Dugis, 2008).

### 3.1.1. BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme)

BNPT sebagai instrument dan garda terdepan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi aksi terorisme yang terjadi di Indonesia memiliki pengertian dan defenisi sendiri atas terorisme. Bagi BNPT, tindakan terorisme adalah tindakan dimana pembunuhan yang sengaja dilakukan, Sistematis, melukai dan mengancam orang-orang yang tidak bersalah yang pada akhirnya menimbulkan sebuah kekacauan dan ketakutan. BNPT menyimpulkan bahwa tujuan dari tindakan teror yang dilakukan oleh para teroris adalah tujuan politis dengan aksi kekerasan yang mereka lakukan. Artinya, BNPT sudah menyimpulkan bahwa seluruh kegiatan dan aksi yang dilakukan oleh para terorisme ujungnya bertujuan untuk tujuan politik dengan cara menyebarkan teror kepada masyarakat umum. Klasifikasi aksi teror yang dilakukan oleh para pelaku teror bagi BNPT harus sistematis dan terstruktur dalam misi mereka menyebar ketakutan kepada masyarakat umum (Armanto Heri S., 2019).

Sebuah badan yang menanggulangi terorisme di Indonesia yang bernama BNPT atau Badan Nasional Penanggulangan Teroris, juga telah melakukan tugasnya. Yang mana, BNPT melakukan upaya untuk menanggulangi ideologi radikal serta mengupayakan gerakan anti Radikal dengan program Deradikalisasi. Deradikalisasi ini adalah upaya yang dilakukan untuk membendung radikalisme itu sendiri, karena radikalisme ini harus dibendung. Keharusan dalam membendung radikalisme dikarenakan kelompok ataupun individu yang berorientasi pada aktivitas radikal dapat membahayakan negara ataupun warga negaranya. Hal itu terjadi karena dari radikalisme individu maupun kelompok dapat mengarah pada aksi kekerasan, teror bahkan peperangan yang pastinya sangat membahayakan negara maupun warga negaranya

(Haryadi, 2017). Deradikalisasi ini seharusnya menjadi tombak utama dari pemerintah Indonesia dalam kebijakan sekuritisasi yang dijalankan.

Dalam melakukan Deradikalisasi, BNPT menunjukan aksi ini kepada individu atau kelompok inti yang terduga radikal. Deradikalisasi ini dilakukan agar para militant dapat meninggalkan cara kekerasan dan menggantinya dengan menumbuhkan semangat kebangsaan. Seperti halnya mengundang langsung ulama “moderat” yang berasal dari Timur Tengah untuk menjelaskan yang dilakukan oleh para militant ini salah. Karena pada dasarnya, orang-orang yang tergabung dalam kelompok militant ini biasanya salah mengartikan atau hanya mengartikan secara sempit makna dari sebuah jihad. Bimbingan langsung dari mantan terpidana teroris juga dilakukan oleh BNPT dengan cara pembinaan kemandirian dan sosial dari mantan terpidana teroris tersebut (Pabyantara, 2018).

Deradikalisasi yang BNPT lakukan sebenarnya memiliki empat pendekatan yang dilakukan, yang mana empat pendekatan tersebut adalah reedukasi, rehabilitasi, resosialisasi, dan reintegrasi. Reedukasi adalah metode pemerintah untuk menangkalkan paham dan ideologi yang membuat para teroris menjadi radikal dan melakukan aksinya dapat terbendung dengan memberi pencerahan kepada masyarakat apa dan bagaimana paham radikal itu. Rehabilitasi sendiri memiliki dua makna, yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian, yang mana hal itu dilakukan untuk mengubah mind set para teroris dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat (Haryadi, 2017). Resosialisasi sendiri adalah pemberian identitas baru yakni seperti pembelajaran norma, nilai, sikap dan perilaku bagi para narapidana teroris agar bisa kembali ke masyarakat (Zakiyah, 2015). Terakhir, reintegrasi adalah pembentukan norma atau nilai

baru kepada para narapidana teroris untuk masuk kedalam lingkungan sosial masyarakat (Gischa Prameswaria, 2021).

Para narapidana yang diupayakan untuk deradikalisasi oleh BNPT diklasifikasikan kedalam 4 tingkatan, yang mana klasifikasi itu disebut sebagai level 1 sampai level 4. Pada level satu, para militant atau narapidana yang akan diupayakan untuk deradikalisasi adalah orang-orang yang memegang teguh keyakinan radikal mereka seperti batu karang, yang mana mereka cenderung akan memegang teguh keyakinan mereka. Pada level yang dua adalah orang-orang yang juga tegas seperti pada level satu, tetapi tidak menutup pintu komunikasi dengan orang lain yang mana sedikit lebih lunak daripada level 1. Level tiga adalah orang-orang yang tidak tegas akan pendirian nya dan juga ingin berkomunikasi yang pastinya akan lebih mudah untuk dideradikalisasi. Pada level terakhir yaitu level 4, dikategorikan bahwa pada level ini hanyalah diisi oleh orang-orang sama sekali bukan ideologi atau hanya orang-orang yang ikut-ikutan saja untuk menjadi teroris. Pada level terakhir ini diistilahkan pula sebagai KW nya teroris (Arnaz, 2016).

Tetapi, klasifikasi level atas keyakinan para terpidana teroris tentang keyakinannya ini tidak serta merta sangat membantu. Hal itu terjadi karena klasifikasi yang diberikan kepada seorang terpidana teroris bisa saja salah karena ada kemungkinan para terpidana teroris ini akan berkamufase. Maka, untuk melihat dan memutuskan bahwa ideologi dan keyakinan seorang terpidana terorisme sudah berubah sangatlah sulit karena adanya kemungkinan kamufase yang bisa saja mereka lakukan untuk mengecoh pemerintah dan aparat yang bertugas. Contoh konkrit atas kamufase ini adalah seperti Santosi yang menjadi pimpinan dari MIT, yang mana awalnya pemerintah menganggap

bahwa dia bukanlah ideolog dan bukan sebuah ancaman yang berarti. Maka, hal yang paling sulit dalam proses deradikalisasi ini adalah memutuskan apakah terpidana teroris tersebut benar-benar sudah berubah keyakinannya atau hanya kamufase untuk mengelabui para petugas (Arnaz, 2016).

Deradikalisasi menurut Said Nursi sendiri adalah sebuah program dan upaya untuk menanggulangi penyesatan faham agama yang mengedepankan tindakan irrasional, *rigid*, dan sering menggunakan kekerasan. Penyesatan yang berbanding terbalik dengan bagaimana sebenarnya agama ini harus ditanggulangi dan diberantas. Deradikalisasi ini pastinya membutuhkan waktu yang lama, karena pada dasarnya deradikalisasi harus juga mencakup deideologisasi atas pemahaman yang telah dibangun sebelumnya. Maka, deradikalisasi harus dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan seperti pendekatan psikologi, pendekatan keagamaan, pendekatan sosial-budaya, pendekatan ekonomi, pendekatan hukum dan kekuasaan dalam tempo waktu yang cukup panjang. Deradikalisasi juga sejalan dengan kontra-terorisme karena pada dasarnya deradikalisasi adalah sebuah bentuk kebijakan dari kontra-terorisme (Faiz, 2017).

BNPT juga telah menyusun SOP AP (Standart Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah) tentang serangan terorisme yang menggunakan bahan-bahan kimia, biologis, radioaktif dan unsur nuklir. SOP AP ini dibuat untuk menanggapi serangan teror yang sudah mulai bergeser pemakaian jenis senjata yang dipakai oleh teroris di Indonesia yang sudah menggunakan CBRNE yang dalam skala besar dapat menjadi senjata pembunuh massal. SOP AP yang dibuat oleh BNPT adalah Peraturan Kepala BNPT Nomor PER-07/K.BNPT/22/2013 dimana SOP AP ini digunakan untuk menyamakan gerak langkah dan persepsi dari pihak yang bertugas untuk serangan terorisme menggunakan bahan

WMD (Weapon Mass Destruction). Dalam SOP AP ini yang bertindak dan berwenang dalam urusan menanggulangi serangan teror dengan WMD dibagi menjadi 6 variabel fungsi yaitu Command Center (Puskodal), Tim Reaksi Cepat Penilai Situasi (TRCPS), Tim Penindak, Tim Penanggulangan Kontaminasi (TPK), Tim Penegakan Hukum dan Tim Bantuan Operasi. Dalam implementasinya, 6 variabel fungsi ini diatur langkahnya secara terpadu melalui 7 tahapan. 7 tahapan tersebut adalah perencanaan (Pra-Incident Terorisme), Persiapan dan Kesiapsiagaan, Pengenalan, Respons, Intervensi, Pengendalian Situasi dan Pemulihan Stabilisasi (Yohanes Genius putu Sanjaya, 2020).

Walaupun pemerintah sudah melakukan program deradikalisasi kepada warga Poso yang sangat tinggi kemungkinannya untuk menjadi bagian dari kelompok ini, peluang kelompok MIT untuk berkembang diduga masih sangat besar. Pasalnya, program deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT sebagai representative pemerintah untuk penanggulangan terorisme di Indonesia tidak tepat sasaran. Deradikalisasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak tepat sasaran untuk menjangkau kelompok yang rentan terkontaminasi paham radikal dan mewujudkan hilangnya paham radikal di Poso maupun di bumi Indonesia. Program deradikalisasi yang dilakukan oleh pemerintah cenderung terlihat seperti program ceremonial saja. Belum lagi untuk masalah deteksi dini atas ancaman teroris yang akan terjadi, pemerintah belum dapat mengoptimalkan pengamanan bahkan dari level terendah, terluar dan terdepan. Serta pola komunikasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat untuk program deradikalisasi ini masih belum baik (Bayu Galih, 2016).

Upaya kontra-narasi, kontra-propaganda, kontra-ideologi, dan kontra-radikalisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia juga tergolong lemah, yang mana

mengakibatkan mudahnya kelompok teroris mendapatkan kesuksesan atas radikalisasi yang mereka lakukan. Saat upaya pemerintah sudah gagal dan bertemu dengan kemiskinan, kesenjangan sosial dan ketidakadilan yang diterima masyarakat maka isu radikalisme akan sangat mudah bagi paham radikal masuk ke Indonesia. Maka, akan mudah bagi kelompok yang menyebarkan paham radikal di Indonesia mendapatkan simpati dan bantuan dari warga local di Indonesia yang merasa mendapatkan jati diri mereka. Kesulitan membendung orasi-orasi radikal di internet juga menjadi faktor besar berkembangnya pemikiran radikal di Indonesia, yang mana internet sudah sangat mudah dijangkau oleh berbagai golongan. Kesulitan dalam membendung radikalisme dari internet ini juga diakui oleh pemerintah, yang mana pemerintah sudah pernah melakukan tindakan yakni menutup situs-situs yang menyebarkan radikalisme sebanyak 26 situs. Tetapi kemudian muncul situs-situs baru dengan pola dan konsep yang sama dalam misinya menyebarkan paham radikalisme dengan menggiring satu agama tertentu di Indonesia yakni agama Islam (Nainggolan, 2016)

Setelah tertangkap pada tahun 2015, 35 mantan narapidana terorisme dari kelompok Mujahidin Indonesia Timur diberikan program deradikalisasi pada tahun 2019. BNPT membantu dan membina para mantan narapidana terorisme ini dengan mengajarkan berwirausaha. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Rusli Baco Dg menyatakan bahwa para mantan narapidana terorisme sudah banyak yang kembali kemasyarakat dengan kehidupan yang baik dan berkecukupan. Bahkan beliau menyatakan bahwa beberapa dari mereka sudah ada yang menjadi pegawai di kantor pemerintahan dan lembaga pemerintahan serta beberapa menjadi pengusaha yang usahanya juga bervariasi. Beliau juga menyatakan bahwa hampir semua mantan

narapidana terorisme ini diikutkan kedalam program deradikalisasi pemerintah dan semuanya berjalan dengan baik. Bahkan beberapa mantan narapidana terorisme ini yang memiliki skill atau kemampuan lebih juga diberikan proyek, karena menurut beliau tidak ada salahnya memberikan mereka pekerjaan yang halal agar mantan narapidana terorisme ini tidak kembali lagi kedalam kelompok radikal lagi seperti kelompok Mujahidin Indonesia Timur (Bustan, 2021).

Seorang akademisi di IAIN Palu, yakni Muhammad Lukman S Tahir memiliki pengalaman yang panjang dalam mendampingi para narapidana terorisme. Beliau menyatakan bahwa mantan narapidana terorisme ini memiliki kehidupan sosial yang harus dihargai, dilindungi dan dijunjung harkat dan martabatnya. Para mantan narapidana terorisme ini seharusnya dapat merasakan dampak dari kebijakan dan politik pemerintah dari sector ekonomi, pendidikan, kesejahteraan masyarakat dan juga kesehatan. Ditambah lagi, para mantan narapidana terorisme ini sudah mengakui bahwa mereka salah dan telah bersedia pula untuk menjunjung tinggi kemanusiaan, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini harus disambut baik oleh pemerintah dengan kewajiban pemerintah untuk mengayomi mereka. Lukman juga menambahkan bahwa membangun kepercayaan diri bagi para mantan narapidana terorisme ini sangat penting bagi mereka, karena ditakutkan mereka akan terjebak dengan label yang telah ada pada diri mereka (Bustan, 2021).

Seorang mantan narapidana terorisme, yakni Arifuddin yang juga pernah berjuang bersama Santoso dan Basri, yang mana mereka juga pentolan dari kelompok Mujahidin Indonesia Timur. Setelah selesai dengan pemidanaan dan hukuman yang diberikan oleh negara kepada Arifuddin, dia kembali kemasyarakat. Tetapi, menurut beliau peran pemerintah minim setelah kebebasan yang dia dapat, karena dia kembali ke masyarakat

atas usahanya sendiri dan bantuan dari LSM serta warga sekitar yang mendukungnya. Menurut Arifin, karena minimnya peran pemerintah setelah kebebasan para mantan napi terpidana teroris, banyak yang kembali ke jalan terorisme lagi karena tidak diterimanya mereka di masyarakat. Selain faktor kesejahteraan atau biaya yang diperlukan untuk hidup, faktor terbesar adalah kecenderungan masyarakat untuk mendiskreditkan mantan napi teroris ini yang membuat mereka sudah berbaur dan mendapatkan pekerjaan. Bahkan Arifuddin memiliki statement bahwa para mantan napi terorisme ini tidak setuju bahwa mereka dapat keluar dari jejaring terorisme karena bantuan dari BNPT, tetapi mereka keluar atas kesadaran diri mereka sendiri (BBCNEWS, 2018).

Untuk statement dari mantan narapidana terorisme Arifuddin tersebut, Jack Manupatty yakni asisten Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antar Iman dan Antar Peradaban tidak membantahnya. Namun, Jack menyatakan bahwa pemerintah sedang membenahi dan mengubah pendekatan deradikalisasi dan penyelesaian masalah dengan perlahan. Beliau menyatakan bahwa pemerintah cenderung lebih memperhatikan pendekatan keamanan dan bantuan kemanusiaan, tetapi tidak dengan proses sosial dan kultural. Menurut Jack pemerintah membutuhkan asisten dari kelompok masyarakat sipil dalam misi deradikalisasi dan rekonsiliasi pasca konflik. Beliau juga berpendapat bahwa misi pemerintah bukan hanya meperkuat masyarakat dari paham radikalasi, tetapi juga harus memperkuat diri dengan pengetahuan dan keterampilan dalam menangani kasus serupa (BBCNEWS, 2018).

Sebuah langkah yang dilakukan oleh kepala BNPT yakni Boy Rafli Amar yang memberikan sebuah motor kargo barang kepada lima mantan narapidana terorisme Poso yang sudah bebas. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari program deradikalisasi yang

menjamin dan memberikan bantuan ekonomi kepada mantan narapidana terorisme ini agar tidak kembali lagi kedalam lingkup terorisme. Namun, pengamat menyatakan bahwa program deradikalisasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah ini tidak sesuai dengan harapan BNPT itu sendiri. Karena pada dasarnya program dan aksi yang dilakukan oleh BNPT sendiri tidak terencana dengan baik, kerap kali program yang dijalankan pun tidak dengan kajian ilmiah serta tidak sesuai dengan kondisi dilapangan. Tidak adanya program evaluasi serta tidak adanya monitoring untuk mengukur pencapaian program deradikalisasi yang dilakukan BNPT ini juga merupakan sebuah masalah besar dari program deradikalisasi itu sendiri. Hal ini diutarakan oleh beberapa pengamat jaringan terorisme MIT dan juga mantan kombatan dari kelompok MIT itu sendiri (Keisyah Aprilia, 2020).

Adriyani Badrah sebagai Direktur Eksekutif Celebes Institute memaparkan fakta bahwa program deradikalisasi yang dijalankan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dan lembaga swadaya masyarakat di Poso kurang terencana dengan baik. Pasaunya, menurut beliau para mantan narapidana terorisme MIT dan kombatan konflik Poso tidak mendapatkan pendampingan yang serius melalui pelatihan yang diberikan maupun coaching clinic. Beliau memberikan contoh salah satu dari terpidana terorisme dari kelompok MIT yaitu Basri yang bisa kabur dari penjara pada tahun 2013 padahal harus menjalani hukuman penjara 19 tahun. Hasil penelitian yang dilakukan oleh IPAC (Institute for Policy Analysis of Conflict) menunjukkan bahwa setidaknya ada 94 mantan narapidana terorisme kembali kedalam jaringan teroris setelah menyelesaikan hukuman mereka. Bahkan, IPAC menyatakan bahwa mantan narapidana terorisme yang kembali ke jaringan terorisme setelah dipenjara ini kebanyakan bergabung

kedalam MIT, kamp pelatihan terorisme di Aceh tahun 2010, dan ISIS. Yang mana kedua kelompok tersebut juga berafiliasi dengan MIT yang ada di Poso (Keisyah Aprilia, 2020).

Bantuan-bantuan diberikan oleh pemerintah kepada mantan narapidana terorisme yang meliputi modal usaha, pelatihan keterampilan, pemberian peralatan kerja hingga akses kepada proyek-proyek pemerintah daerah. Tetapi, bantuan-bantuan ini tidak merata kepada seluruh mantan narapidana terorisme yang sudah di deradikalisasi tersebut, yang mana hal ini dapat menyebabkan kecemburuan antar mantan narapidana terorisme itu sendiri. Menurut salah seorang mantan kombatan konflik Poso, Sukarno Ahmad Ino model proyek deradikalisasi yang dilakukan oleh pemerintah cenderung kejalan yang “instan.” Menurut beliau hal ini dapat menyebabkan kecemburuan sosial antara para mantan narapidana terorisme atau mantan kombatan yang tidak mendapatkan bagian proyek dari pemerintah tersebut. Menurut Ino, hal yang paling berguna bagi para mantan terpidana terorisme dan mantan kombatan Poso tersebut adalah penanaman pengetahuan yang cukup kepada mereka (Keisyah Aprilia, 2020).

Seorang pengamat terorisme dari Community of Ideological Islamic Analysis yakni Harits Abu Ulya menyatakan bahwa masalah di Poso yang menyebabkan kelompok teroris tersebut tidak pernah padam bukan hanya karena persoalan ekonomi semata. Masalah dan persoalan yang ada di Poso sebenarnya juga tersangkut paut dengan masalah keadilan yang diterima oleh para masyarakat Poso yang menganggap tidak mendapatkan keadilan dari konflik masa lalu. Menurut beliau, jika program deradikalisasi hanya berfokus kepada hanya memfokuskan diri kepada soal ekonomi semata tanpa memperhatikan dan mengubah mindset dengan pendekatan teologis dan keadilan yang dituntut oleh masyarakat tidak jalan, maka keberhasilan dari program deradikalisasi ini

susah diharapkan. Karena pada dasarnya keadilan yang diharapkan oleh masyarakat itulah yang merupakan awal dari keputusan untuk kelompok teroris MIT ini menjadi kelompok teroris yang meresahkan di Poso itu sendiri. Kompleksitas masalah yang ada di Poso hendaknya lebih diperhatikan oleh pemerintah dalam menjalankan program deradikalisasi ini, baik kepada anggota kelompok MIT yang sudah tertangkap maupun kepada masyarakat (Keisyah Aprilia, 2020).

Keadilan sosial yang seharusnya didapatkan oleh warga negara tidak didapatkan oleh para pelaku teror ini, khususnya orang-orang yang tergabung kedalam kelompok Mujahidin Indonesia Timur. Ideologi yang MIT miliki dan mereka yakini semakin kuat dan akan terus merembes akibat penindasan, kesenjangan sosial ekonomi dan ketidakadilan yang mereka dapatkan. Situasi ini terlihat semakin parah akibat benturan yang terjadi antara ideologi-agama-politik ditingkat menengah kebawah yang entah disadari atau tidak oleh pemerintah. Kebencian para teroris ini akan semakin menguat karena media yang dapat kita saksikan di televisi Indonesia sendiri, yang mana kita dapat melihat bagaimana banyak masalah politik digiring kedalam masalah agama. Contoh yang paling dekat dan paling mudah didapat adalah banyaknya kasus dimana petugas dan aparat negara yang bentrok langsung dengan kelompok-kelompok muslim yang seakan memperlihatkan bahwa negara sering bermasalah dengan agama tertentu. Hal ini dapat menguatkan para pelaku teror khususnya kelompok MIT untuk membenci aparat kepolisian dan menganggap bahwa aparat kepolisian adalah musuh mereka (Sahasrad, 2016).

Dalam kasus ketidakadilan sosial ini, seharusnya Pemerintah hadir disana untuk menunjukkan bahwa Negara bertanggung jawab akan keadilan sosial seluruh rakyatnya

serta menunjukkan kestabilan perlindungan dan pengayoman yang diberikan. Kelompok MIT akan turun gunung dan menyerahkan diri sendiri jika ada jaminan amnesti walaupun hanya sebagian anggota yang akan turun. Setidaknya cara ini akan lebih efektif dan mengurangi pendanaan dan biaya dalam misi negara menanggulangi teroris yang ada di Indonesia. Tetapi, karena keadilan sosial yang tidak mereka dapatkan jaminan atas itu, maka ideologi salah yang telah mereka pelajari akan tetap kuat dan bahkan semakin kuat. Hal itu terjadi karena ajaran agama Islam yang mereka salah artikan dalam kategori jihad yang membentuk sebuah harapan eskalologis bagi mereka yakni dengan kepercayaan dan harapan untuk menjemput surga. Karena mereka yang selalu di cap sebagai teroris dan terpinggirkan maka mereka seperti tidak menganggap bahwa diri mereka manusia karena status mereka sebagai teroris telah mendegradasikan kemanusiaan mereka (Sahasrad, 2016).

Seorang mantan teroris di Filipina yang tergabung kedalam Front Pembebasan Islam Moro (MILF), Ali Fauzi menyatakan bahwa setelah kematian Santoso ISIS yang menjadi pedoman radikalisme yang dimiliki oleh Santoso ingin membalaskan kematiannya. Maka, pemerintah harus waspada akan regenerasi yang ada terkait kelompok Mujahidin Indonesia Timur ini, karena menurut beliau pasti ada pengganti dari Santoso untuk memimpin MIT. Fauzi juga menyatakan bahwa beliau telah membaca banyak postingan di facebook ataupun twitter terkait himbuan juru bicara ISIS agar member yang berbaiat kepada ISIS di Indonesia segera bersiap untuk membalaskan kematian Santoso. Tetapi, menurut Fauzi program deradikalisasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat dan para mantan anggota MIT tidak tergolong gagal dikarenakan program deradikalisasi adalah hal yang berat. Deradikalisasi dinyatakan berat karena

bukan hal yang mudah jika kita ingin mengubah mindset dan hati seseorang (Andylala Waluyo, 2016).

Sekuritisasi yang ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia dalam penanganan teroris dapat dikatakan tidak efektif. Hal ini dapat dilihat saat BNPT tidak terlihat baik dalam menanggapi apa yang dibutuhkan oleh rakyat agar tidak tertular radikalisme. Jika ditilik, kontra-radikalisasi yang dilakukan pemerintah juga cukup minim. Padahal hal ini sangat penting mengingat Poso yang menjadi basecamp bagi MIT adalah daerah bekas konflik yang berbasis agama dan MIT juga menggaungkan agama dalam ideologi mereka. Dari sini kita dapat melihat bahwa Poso adalah daerah yang akan sangat mudah dimasuki pemikiran radikal. Maka pemerintah akan sangat diperlukan membuat serta mengembangkan kontra-radikalisme di Poso.

### **3.1.2. Militer**

Pada 31 Agustus tahun 2015, pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo, disampaikan keputusan pada sebuah rapat paripurna tingkat menteri untuk menangani kasus terorisme yang dilakukan oleh MIT. Pada rapat itu diputuskan bahwa militer diturunkan untuk membantu negara dalam penanganan aksi teror yang dilakukan kelompok MIT. Militer yang diterjunkan langsung oleh keputusan dari rapat tersebut adalah POLRI dan TNI, yang mana POLRI ditunjuk sebagai leading sector dalam misi ini. Hal ini diputuskan mengingat bahwa POLRI juga memiliki tugas untuk mencegah, menanggulangi, dan memberantas gangguan keamanan dan ketertiban umum (Kamtibmas) yang tertulis pada Pasal 1 Angka 4 Perkap Nomor 9 tahun 2011. Peraturan ini adalah bagian dari Pasal 6 Peraturan Kepala Negara (Perkap Kapolri) Nomor 3 Tahun

2009, yang mana peraturan ini adalah peraturan selain kegiatan Kepolisian. Lalu, misi ini diselenggarakan POLRI dan gabungan militer lain dengan membentuk sebuah Satgas (Armanto Heri S., 2019).

Kepolisian Negara Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia juga berperan aktif dalam menanggulangi aksi teror yang terjadi di Indonesia. Salah satu langkah yang diambil oleh kepolisian Indonesia adalah pembentukan Densus 88, yang mana detasement ini berwenang atas penangkapan, pengeledahan, dan penyitaan barang bukti terkait aksi terorisme. TNI juga turut memberikan andil dalam memberantas aksi teror di Indonesia, yang mana sudah tertulis pada Pasal 2 UU TNI No.34/2004. Dalam UU TNI ini, tugas pokok TNI juga meliputi kegiatan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang mana pemberantasan aksi teror dan terorisme termasuk kedalamnya. Maka, Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menangani kasus terorisme yang ada di Indonesia (Ihsan, 2019).

Tak hanya Kepolisian, TNI dan BNPT saja yang ikut andil dalam memerangi terorisme dan paham radikal di Indonesia, tetapi beberapa institusi negara juga ikut andil didalamnya. Seperti KOMINFO juga ikut andil dalam memblokir 19 situs diinternet yang teridentifikasi sebagai laman yang memobilisasi dukungan kepada IS pada maret 2015. Walaupun tindakan tersebut dapat dikatakan kurang efektif karena akan mudah bagi para simpatisan IS untuk membuatnya lagi, tetapi KOMINFO sudah menunjukkan bahwa mereka juga siap dalam misi memberantas terorisme di Indonesia. Selain itu, Kementerian Agama Indonesia juga melakukan seruan bahwa ideologi yang disebarluaskan IS kontradiktif dengan ideologi yang dimiliki Indonesia yaitu ideologi Pancasila. Beberapa kelompok organisasi masyarakat juga tak tinggal diam untuk ikut andil seperti NU dan

Muhammadiyah yang terus menyerukan bahwa ideologi yang dibawa IS tidak benar (Kushindarti, Respons Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Perkembangan Gerakan Islamic State di Indonesia, 2017).

Sifat Kepolisian yang berubah juga menjadi kunci sukses akan keberhasilan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi tindakan terorisme di Indonesia. Jika dahulu Kepolisian bersifat reaktif, berbeda dengan sekarang yang berubah menjadi sifat proaktif. Perubahan ini merupakan perubahan yang signifikan dan baik untuk dijalankan oleh Kepolisian Indonesia. Karena sejatinya perubahan sifat ini dapat mewaspadai dan membendung kemungkinan buruk yang akan terjadi karena aksi teror yang disebarkan oleh para pelaku teror. Hal ini terjadi karena pada sifat yang proaktif, Kepolisian Indonesia akan lebih sigap dan mengedepankan upaya-upaya pencegahan terhadap aksi teror yang kemungkinan akan terjadi. Maka, Kepolisian dan Pemerintah Indonesia dapat selangkah lebih maju dari pelaku teror yang akan melakukan aksi-aksi mereka di Indonesia (Rezeki Revi Respati, 2020).

Kepolisian Republik Indonesia menggelar satu misi pemburuan terhadap kelompok teroris MIT yang pada kala itu dipimpin oleh Santoso atau Abu Wardah. Pada tahap awal, Polri membuat sebuah operasi yang bernama Camar Maleo, yang mana operasi ini bertahan hingga operasi Camar Maleo yang ke empat. Pada operasi Camar Maleo I, yang dijalankan pada 26 Januari – 26 Maret tersebut, Polri mengklaim telah menangkap 17 orang yang diduga merupakan anggota dari jaringan kelompok MIT dan menduga ada orang yang bertugas untuk menyuplai makanan bagi kelompok MIT dari 17 orang tersebut. Setelah itu, operasi Camar Maleo II pun digelar pada 7 Juni yang bermodalkan tambahan 1000 pasukan Brimob. Camar Maleo III dibentuk dan dijalankan

setelah adanya serangan yang dilakukan oleh kelompok MIT kepada warga, yang mana serangan ini adalah bentuk balasan dari kelompok tersebut atas serangan yang diberikan Polri pada operasi Camar Maleo II. Lalu, dilakunlah operasi Camar Maleo yang terakhir yaitu operasi Camar Maleo yang ke IV yang berakhir pada 9 Januari (Lubabah, R.G, 2016).

Operasi Camar Maleo-2012 dilaksanakan berdasarkan rencana operasi yang dibuat oleh POLRI dengan rencana operasi nomor: R/Renops/06/X/2012 dengan konsep umum operasi yang mana operasi penegakan hukum regional pencegahan tindak pidana terorisme. Operasi Camar Maleo I, II dan III dengan struktur dan rencana operasi yang sama tidak terlalu berdampak besar seperti yang diharapkan. Maka pada Operasi Camar Maleo IV pada tahun 2015, rencana operasi diubah menjadi rencana operasi nomor: R/10/X/Renops/2015 dengan konsep operasi yang dilakukan oleh satgas pada saat itu terpusat. Pada rencana operasi Camar Maleo IV ini POLRI dan Polda Sulteng bergabung dengan Satgas TNI beroperasi untuk pemulihan keamanan terbuka dan tertutup dalam rangka mewujudkan stabilitas keamanan yang aman dan kondusif diwilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Rencana operasi yang dilakukan POLRI berubah-ubah pada saat itu dikarenakan evaluasi yang dilakukan oleh POLRI sendiri. Yang mana evaluasi dilakukan oleh Satgas Operasi dengan evaluasi harian dan bulanan yang menjadi proses pembelajaran aktif yang berulang dari Satgas yang telah dibentuk (Armanto Heri S., 2019).

Operasi-operasi dari Camar Maleo ini selain menargetkan untuk menangkap Santoso dan anggota dari kelompok MIT juga ingin menciptakan rasa damai dan aman pada masyarakat. Pada operasi ini, tim gabungan Camar Maleo berhasil menewaskan

salah satu orang kepercayaan Santoso di MIT. Yang mana, Daeng Koro orang kepercayaan Santoso itu tertembak saat baku tembak yang terjadi di pegunungan Sakonan Jaya, Parigi Mautong. Operasi Camar Maleo ini terus diperpanjang menjadi empat jilid dikarenakan target dari operasi ini yang belum selesai yakni menangkap pemimpin dari kelompok MIT itu sendiri. Walaupun begitu, misi lain untuk membuat masyarakat merasa aman sudah dapat terpenuhi dan operasi ini setidaknya dapat mengantisipasi aksi teror yang akan dilakukan oleh kelompok MIT (Lubabah, R.G, 2016).

Tak sedikitit public yang meragukan kinerja dari kepolisian pada saat itu, pasalnya sebelumnya memang kinerja Kepolisian tidak terlihat baik. Karena pada dasarnya para teroris yang pada saat itu sudah sangat kuat karena kebebasan mereka melakukan migrasi ke Filiphina tampak meragukan keberhasilan dari Kepolisian Khususnya Densus 88. Ditambah lagi pada saat itu ada anggapan bahwa ada teroris yang berhasil kembali ke Indonesia setelah pulan dari luar negeri yakni Dulmatin dan Abu Dujana. Bukan hanya itu, keberhasilan para kelompok teroris dalam membunuh 40 petugas polisi pada saat itupun menjadi skeptisisme besar bagi masyarakat. Pada tahun 2011, akhirnya BNPT mengutus seorang Mayor Jendral Agus Surya Bakti yang menandakan pula tentara diizinkan untuk membantu operasi penganggulangan terorisme. Dan pada Maret 2015 anggota militer sudah aktif untuk berlatih bersama dengan polisi dalam misi mereka memberantas terorisme (Singh, 2016).

Tentara Negara Indonesia yang sudah mulai bergabung dengan POLRI untuk memberantas kelompok teroris dalam tugas TNI diluar kegiatan perang, maka TNI akan terjun langsung ke medan perang. Satgas Tinombala yang menjadi perwujudan dari terjun

nya militer untuk mengamankan Indonesia dari teroris. Satgas Tinombala ditujukan untuk memburu dan dan melumpuhkan kawan teroris Mujahidin Indonesia Timur. Yang mana, satgas ini terbentuk dari beberapa kesatuan dan detasement, yaitu Brimob, Kostrad, Marinir, Raidet dan Kopasus. Satgas ini kemudian memiliki masalah karena pastinya militer memiliki kode etik tertentu dalam menjalankan tugasnya. Maka, masuknya militer kedalam urusan teroris memiliki dampak baik dan buruk dalam misi yang dijalankan (Wicaksono, 2021).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, tertulis pada Bab IV pada kategori peran, fungsi dan tugas, yakni pasal 5 bahwa peran dari TNI berisi “TNI berperan sebagai alat negara dibidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara”. Maka, TNI sejatinya adalah alat negara dan seluruh tindakan nya diatur berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Pada pasal 6 di BAB yang sama, dijelaskan dalam ayat 1 huruf A, bahwa fungsi TNI adalah “penangkal setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa”. Artinya, TNI memang harus mengambil peran kedalam pemberantasan terorisme Mujahidin Indonesia Timur ataupun kelompok teror lain yang berpotensi mengacaukan Indonesia. Lebih dari itu, TNI juga berfungsi sebagai “penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan”, “pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan” yang tertuang dalam pasal 6 ayat (1) huruf b dan c (Indonesia, 2004).

Terbentuknya Satgas Tinombala pada tahun 2016, tepatnya pada tanggal 10 Januari 2016. Satgas ini adalah sebuah lanjutan dari operasi yang dijalankan oleh Kepolisian Republik Indonesia untuk memburu kelompok Mujahidin Indonesia Timur sebelumnya yang bersandi Camar Maleo. Setelah Camar Maleo ke-IV berakhir, maka muncullah Satgas Tinombala sebagai lanjutan dari operasi dalam penangkapan Santoso dan kawan-kawan. Langkah yang dilakukan oleh Satgas Tinombala terbilang cerdas, karena saat menjalankan tugasnya, Satgas Tinombala tidak hanya berfokus pada perburuan kelompok Mujahidin Indonesia Timur saja. Tetapi, Satgas Tinombala juga berusaha untuk memutus rantai aliran logistic dari kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang nantinya akan memudahkan Satgas menemukan lokasi dai kelompok ini karena kehabisan logistic. Ditambah dengan penyisiran yang dilakukan oleh Satgas Tinombala yang pastinya akan membuat kelompok Mujahidin Indonesia Timur akan semakin terpojok (FX. Richo Pramono, 2016).

Dibentuknya Satgas Tinombala pada misi operasi dalam memburu kelompok teroris MIT yang dipimpin Santoso pada waktu itu menandakan keterlibatan penuh TNI dalam operasi pemberantasan teroris di Poso. Pasalnya, pada saat Satgas Tinombala disahkan untuk menangani operasi penangkapan kelompok MIT pada saat itu, anggota TNI yang terjun langsung untuk membantu operasi ini melebihi anggota POLRI. Dari 3.406 anggota yang bertugas didalam tim Satgas Tinombala ini, anggota TNI berjumlah 1.888 personil dan anggota dari POLRI berjumlah 1.518 personil. Dalam misi operasi yang diemban oleh Satgas Tinombala pada saat itu dibagi menjadi 4 sektor yakni sektor 1 diwilayah Poso Pesisir Utara, sector 2 di Poso Pesisir, sector 3 di Poso pesisir Selatan dan sector 4 berada diwilayah lembah Napu dan sekitarnya. Dalam praktiknya, Satgas

Tinombala menyebar seluruh personil yang tergabung ke seratus titik diseluruh sector-sector tersebut. Keiutsertaan TNI kedalam operasi yang dilakukan oleh Satgas Tinombala ini berdampak baik, yang mana untuk pertama kalinya dalam operasi yang dilakukan di Poso, prajurit TNI dari Marinir TNI AL berhasil menembak mati dua anggota kelompok MIT dibawah kepemimpinan Santoso tersebut (Intan Pratiwi, 2016).

Operasi tim Satgas Tinombala yang bertujuan untuk pemulihan keamanan di Poso terkait kelompok terorisme MIT yang bemarkas disana, disambut baik oleh masyarakat. Peralnya, Satgas Tinombala melakukan banyak langkah pasti untuk misi mereka dalam memburu kelompok MIT yang merupakan target operasi dari Satgas Tinombala itu sendiri. Baliho, pamflet dan selebaran terkait DPO yang tergabung dalam tersangka terorisme kelompok MIT disebarkan oleh Satgas Tinombala yang bertujuan untuk memberitahu masyarakat agar bisa melaporkan kepada petugas dan aparat keamanan Poso jika melihat orang-orang yang ada pada media-media yang diberikan tersebut. Satgas Tinombala juga terus bekerjasama mengintensifkan kondisi yang ada dilapangan yang terkait operasi yang diemban oleh Satgas Tinombala. Satgas Tinombala terus menyisir dan membuat patrol bersama ke daerah-daerah yang dianggap rawan serta memasang sekat-sekat diujung kampung yng berfungsi untuk memantau orang-orang yang keluar masuk kampung tersebut untuk memperkuat keamanan sekitar serta dapat mewaspadaai orang yang tidak dikenal memasuki kampung tersebut. Dari pos-pos sekat ini warga terlihat berterimakasih karena mereka merasa lebih aman saat beraktivitas dengan adanya pengawasan langsung di kampung mereka (Hermawan, 2016).

Sepanjang perjalanan operasi yang dilakukan oleh Satgas Tinombala pada tahun 2016, operasi ini memiliki beberapa pencapaian dengan keberhasilan menangkap dan

membunuh anggota MIT. Sepanjang 2016, Satgas Tinombala berhasil menangkap hidup DPO dari kelompok MIT sebanyak 12 orang, tewas dalam aksi baku tembak sebanyak 20 orang, dan menemukan DPO kelompok MIT yang hanyut sebanyak 2 orang. Barang bukti yang disita oleh Satgas Tinombala juga tergolong banyak, yakni Bom rakitan sebanyak 95 buah (disposal dan urai), benda yang dirakit menyerupai sebuah bom ditemukan 3 buah, senpi laras panjang pabrikan ditemukan 3 pucuk, senpi laras pendek pabrikan ditemukan 2 pucuk, senpi laras panjang rakitan sebanyak 16 pucuk, senpi laras pendek rakitan sebanyak 10 pucuk, senapan angin 3 pucuk dan amunisi berbagai caliber 368 butir. Tetapi dari semua pencapaian yang ada, Satgas Tinombala juga kehilangan beberapa personil dalam operasi mereka melawan kelompok MIT. Terhitung 19 orang dari anggota Satgas Tinombala tewas dari berbagai aspek penyebab. 19 orang tersebut tewas dikarenakan saat kontak senjata pada operasi yang dilakukan oleh Satgas Tinombala, kecelakaan truck, kecelakaan helicopter dan sakit (Redaksi-TNI-POLRI, 2017).

Pada tahun 2016, Santoso sebagai pemimpin pertama dari MIT dapat ditaklukkan oleh pasukan Tinombala, yang mana pelarian gembong teroris tersebut sudah berakhir. Santoso tewas saat baku tembak dengan Satgas Tinombala di pegunungan Ambaranan, Poso (Dio Pratama, 2016). Tetapi, seorang pengamat terorisme yaitu Taufik Andrie menyatakan bahwa keberhasilan dalam membekuk Santoso ini tidak dapat menjamin akan berkurangnya secara signifikan aksi-aksi teror yang akan terjadi. Karena menurut beliau, aksi teror yang dilakukan oleh kelompok MIT ini bukan semata-mata dikarenakan ambisi atau misi dari orang-perorangan tetapi menjadi sebuah misi dari ideologi bagi yang memercayainya. Walaupun keberhasilan ini membentuk sebuah kepercayaan

bahwa moral dari kelompok ini turun, tetapi masih ada kemungkinan kelompok ini akan memberikan serangan balasan. Meskipun begitu, keberhasilan dalam membekuk Santoso ini disambut baik oleh warga, terlebih yang bermukim di Desa Mambuke, Poso Pesisir. Karena Desa tersebut menjadi salah satu tempat perlintasan kelompok Santoso yang bermarkas di kawasan pegunungan di Poso (Sri Lestari, 2016).

Satgas Tinombala juga sigap dalam menanggapi kondisi serta taktik dari kelompok MIT yang merupakan target operasi mereka di Poso. Pasalnya, disinyalir kelompok MIT mulai mengubah taktik mereka untuk menghindari kejaran Satgas Tinombala kepada diri mereka, yang mana info ini didapat dari anggota kelompok MIT yang sudah berhasil ditangkap oleh Satgas Tinombala sebelumnya. Anggota kelompok MIT yang membeberkan taktik baru dari kelompoknya tersebut adalah Samir yang merupakan orang penting di MIT, yang mana Samir adalah orang yang bertugas untuk menghapus jejak dari kelompok MIT saat berlarian menghindari Satgas Tinombala. Samir dapat ditangkap karena sudah terdesak saat dikejar oleh Satgas Tinombala dan diidentifikasi dalam keadaan sakit. Kapolda Sulawesi Tengah, Brigjen Pol Rudy Sufahriady juga mengklaim bahwa mereka sudah mengetahui cara dari kelompok MIT menyelamatkan diri dan bersembunyi dari kepungan tim. Beliau menyatakan bahwa kelompok MIT dapat membaca gerakan Satgas Tinombala saat ingin menyergap mereka dari gerakan pasukan dari bawah gunung menuju keatas yang masih menimbulkan bunyi (Kompas.com, 2016).

Setelah kematian Santoso, Satgas tinombala tetap memburu 19 anggota MIT sisa peninggalan kepemimpinan Santoso. Kepala Satgas Tinombala pada saat itu, yakni Kombes Pol Leo Buna Lubis menyatakan bahwa 19 anggota MIT yang tersisa pada saat

itu tiga diantaranya adalah perempuan yang merupakan istri dari petinggi MIT yaitu Jumiatus Muslin alias Atun alias Bunga alias Umi Delima yang merupakan istri dari Santoso, Susanti Kaduku alias Umi Fadel yang merupakan istri dari Ali Kalora dan Nurmi Usman alias Oma yang merupakan istri dari Basri. Kepala Satgas Tinombala menyatakan akan terus melakukan pengejaran kepada 19 anggota MIT dibawah kepemimpinan Santoso tersebut. Beliau juga menyatakan bahwa setelah adanya operasi dari tim Satgas Tinombala kelompok MIT terpecah menjadi dua kubu yaitu kubu Santoso dan kubu Basri. Operasi yang dilakukan oleh tim Satgas Tinombala ini juga berhasil menyita barang-barang dari kelompok MIT yaitu sepucuk senjata api jenis M-16, empat buah megasin, sebuah telepon genggam merk Samsung, empat buah kartu telepon, sejumlah alat masak, pakaian dan tenda (Fauzi, 2016).

Satgas Mandago Raya yang merupakan Satgas Tinombala yang telah diganti namanya, memfasilitasi warga dan para mantan narapidana terorisme untuk mendaklarasikan diri menolak paham radikal dan terorisme . Kasatgas Humas Mandago Raya menyatakan bahwa deklarasi ini menggandeng banyak pihak untuk meberikan harapan agar terciptanya kedamaian disana. Deklarasi ini dianggap penting, karena pada dasarnya dusun Tamajenka, Desa Masani, Kecamatan Poso Pesisir merupakan basis dari pemikiran radikal yang ada dan bibit dari kelompok Mujahidin Indonesia Timur. Deklarasi tersebut diselenggarakan di Masjid Nurul Huda, Kecamatan Poso dengan ikrar bahwa warga menolak segala bentuk radikalisme dan terorisme untuk keamanan dan kedamaian masa depan yang lebih baik. Tindakan ini dinyatakan sebagai tindakan preventif untuk warga di dusun tersebut, mengingat kebanyakan warga dari dusun tersebut adalah mantan narapidana teroris dan bekas basis militer Mujahidin Indonesia

Timur pimpinan Santoso (Aliansyah, 2021). Disini militer terlihat dapat menunjukkan tindakan sekuritisasi



## BAB IV

### Penutupan

#### 4.1. Kesimpulan

Mujahidin Indonesia Timur atau MIT adalah sebuah kelompok teroris yang berbasis di Poso yang berasal dari sebuah ambisi dari kelompok terdahulu mereka yaitu JAT. Kelompok ini awalnya bernama JAT Poso dan berganti nama menjadi MIT pada tahun 2012 dan menunjuk seorang pemuda asli Poso yang bernama Abu Wardah atau Santoso sebagai pemimpin mereka. Kelompok MIT diketahui sudah melakukan baiat kepada ISIS yang dilakukan oleh pemimpin mereka sendiri, yakni Santoso dengan bukti sebuah video yang mereka unggah ke internet. Tujuan dari kelompok ini juga masih sama dengan tujuan dari pendahulu mereka, JAT cabang Poso untuk mendirikan Negara Islam di Poso itu sendiri. Maka, di Poso mereka membentuk sebuah basecamp bagi kelompok mereka serta membuat tempat pelatihan militer dan menciptakan kader-kader baru untuk memperkuat dan meneruskan perjuangan kelompok MIT itu sendiri.

Ideologi yang dibawa MIT sendiri untuk menjalankan keyakinan mereka saat masuk menjadi bagian dari kelompok yang melakukan teror di Indonesia adalah ideologi *taktir*. Ideologi ini sejalan dengan ideologi yang dibawa oleh ISIS atau NIIS yang mengkafirkan orang lain hanya karena orang lain tidak sejalan dengan pemikiran dan ideologi yang mereka anut. Pemikiran dan ideologi *taktir* ini akan sangat mudah menyebar, berkembang dan menguat di Indonesia, pasalnya banyak faktor yang menguatkan ideologi ini di Indonesia seperti faktor agama, sejarah, dan politik di Indonesia. Ketimpangan social ekonomi juga dapat menjadi pemicu besar dalam urusan

berkembangnya ideologi ini di Indonesia. Maka, ideologi yang diyakini dan diamini oleh kelompok MIT ini adalah ideologi yang sangat kuat dan berbahaya sbagi Indonesia sendiri.

Kelompok ini sangat benci dengan kepolisian dan aparat pengamanan Negara yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu kelompok MIT sangat sering melakukan serangan kepada kepolisian dan aparat pengamanan yang adas di struktur pemerintahan Indonesia. Sebuah video yang diunggah di YouTube pada tahun 2013 dan 2014, kelompok MIT mendeklarasikan kebencian mereka kepada Densus 88 dan menyatakan perang kepada tim Densus 88. Pos Polisi dan Brimob yang ada di Poso sering menjadi target sasaran dari aksi teror yang dilakukan oleh kelompok MIT ini. Seperti penembakan tiga orang anggota kepolisian didepan Bank BCA Palu, penyerangan terhadap patroli Brimob di Kalora, bom di pos Natal pasar sentral Poso dan masih banyak lagi.

Sebuah wacana untuk memerangi terorisme yang digaungkan oleh Amerika Serikat dinamakan dengan wacana Global War On Teror. Indonesia yang sudah sepaham dengan wacana War On Teror yang diwacanakan oleh Amerika Serikat ini. Pasalnya, pasca terjadinya tragedi 9/11 di Amerika Serikat, Presiden pertama Indonesia pada saat itu, yakni Ibu Megawati Soekarno Putri mengunjungi dan memberikan pidato kepada seluruh undangan dengan isi tanggapan Indonesia tentang tragedi 9/11. Disini, beliau menyatakan bahwa Indonesia ikut prihatin, bersimpati dan memberikan dukungan kepada Amerika Serikat pada masa sulit pasca terjadinya tragedi 9/11 tersebut. Indonesia juga mengutuk keras tindakan terorisme dan segala manifesatasi dari aksi yang mereka lakukan. Pada saat pidato tersebut beliau juga menyatakan bahwa Indonesia siap

bekerjasama dengan Amerika Serikat dan seluruh Negara yang ikut dalam misi memberantas teroris.

Pemerintah Negara Indonesia menunjukkan sekuritasi negaranya dalam menanggulangi aksi teror setelah terjadinya Bom Bali I. Pada saat itu Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang telah dirancang sejak tahun 1999-2000 dan digodok lagi menjadi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2002 dan Keputusan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Nomor 26/Menko/Polkam/11/2002 tentang Pembentukan Koordinator Desk Pemberantasan Terorisme. Dalam tindakan sekuritisasi yang dilakukan oleh Indonesia pada saat itu, Indonesia tidak menggaungkan wacana Kontra-terorisme tetapi lebih memilih untuk mengangkat wacana HAM dalam pengaplikasian peraturan yang sudah dikeluarkan. Indonesia juga membuat sebuah tim pecahan dari kepolisian, yaitu Detasement Khusus 88 Antiteror. Badan yang merepresentasikan pemerintah dalam menangani terorisme di Indonesia juga dibuat terpisah dan disebut dengan nama BNPT atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Disini, Pemerintah Indonesia terlihat memiliki dua bentuk representasi dari Pemerintah Indonesia itu sendiri dalam menanggulangi aksi terorisme yang terjadi di Indonesia yakni BNPT dan Kepolisian. Saat melakukan tugasnya, BNPT memiliki tujuan untuk menderadikalisasi anggota dari kelompok teroris yang tertangkap dan kepolisian bertugas untuk menangkap anggota dari kelompok teroris. Deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT seharusnya menjadi tombak utama dari Pemerintah Indonesia dalam misinya menanggulangi aksi teror yang terjadi di Indonesia. Dalam program deradikalisasi ini, BNPT melakukan 4 pendekatan yaitu reedukasi, rehabilitasi, resosialisasi dan reintegrasi.

Sedangkan kepolisian harus masuk dan berjibaku kedalam medan perang untuk menangkap atau membuat kelompok teror ini musnah.

Dalam implementasinya kepada kelompok MIT, program deradikalisasi ini terlihat tidak efektif. Pasalnya, banyak pihak yang menilai bahwa program deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT ini tidak tepat sasaran dan kurang pemahaman dalam implementasinya. Karena pada dasarnya, BNPT terlihat lebih condong untuk membenahi social ekonomi dalam implementasi deradikalisasi yang dilakukan yang padahal kelompok MIT lebih dari itu. Banyak faktor lain yang harus diperhatikan oleh BNPT untuk menanggulangi kelompok MIT ini. Seperti faktor agama, daerah bekas konflik dan pemahaman warga tentang terorise itu sendiri. Program deradikalisasi juga tidak tepat sasaran, yang mana BNPT tidak dapat melihat daerah yang lebih besar kemungkinan nya untuk menjadi anggota dari kelompok MIT ini. Upaya BNPT dalam melakukan kontra-narasi, kontra-propoganda, kontra-ideologi dan kontra-radikalisasi juga tergolong lemah.

Tetapi, militer yang ikut andil dalam menanggulangi terorisme dan aksi teror yang MIT lakukan di Poso terbilang cukup efektif. Pasalnya, saat Kepolisian, Brimob dan TNI bersatu yang kemudian membentuk sebuah satgas untuk menangkap dan memusnahkan kelompok teror dari MIT ini terbilang berhasil. Satgas terakhir yang dibentuk oleh militer di Indonesia ini dapat menangkap dan menembak sebagian besar dari kelompok MIT ini. Bahkan, gabungan dari pasukan militer ini dapat melumpuhkan Santoso atau Abu Wardah yakni pemimpin terdahulu dari kelompok MIT ini. Penyisiran-penyisiran serta pembuatan pos jaga yang dilakukan oleh Satgas ini juga sangat efisien. Satgas dapat memotong jalur yang dilewati oleh kelompok MIT untuk keperluan mereka mendapatkan

suplai makanan. Serta Satgas juga dapat memukul mundur para simpatisan dari kelompok MIT ini lebih jauh keatas gunung dan besar kemungkinan untuk memojokkan mereka.

#### **4.2. Saran**

Pemerintah Indonesia sebagai pengatur keamanan dan pengatur proyek sekuritisasi di Indonesia seharusnya lebih dapat mengenali dan mendalami segala bentuk aksi dan tindakan yang dapat mempengaruhi keamanan dinegara ini. Program deradikalisasi BNPT yang tidak tepat sasaran dan kurang efektif ini harus segera diubah. Karena pada dasarnya deradikalisasi yang paling penting adalah deradikalisasi masyarakat yang belum masuk kedalam sebuah kelompok teror tetapi rawan untuk terjun kedalam sana. BNPT harus bekerja lebih ekstra melihat sector-sektor yang rawan terkena ideologi yang menyimpang dari ideologi yang dibawa oleh bangsa Indonesia. Menelaah faktor-faktor yang dapat menyebabkan radikal nya seseorang juga harus dilihat dan dikaji, karena seseorang yang menjadi radikal bukan hanya dikarenakan faktor ekonomi saja. Dan pemerintah Indonesia sudi kiranya untuk menambah program kontra-radikalisme ke masyarakat umum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmat, F. (2021, Mei 29). *Pernah Bertemu Santoso di Sel, TPM Sulteng Ungkap Alasan MIT Pertama Kali Melakukan Aksi Teror*. Retrieved from TribunPalu.com: <https://palu.tribunnews.com/2021/05/29/pernah-bertemu-santoso-di-sel-tpm-sulteng-ungkap-alasan-mit-pertama-kali-melakukan-aksi-teror?page=2>
- Ahmed Mahmud, A. A. (2016). *Disunity Among Indonesian ISIS Supporters and The Risk of More Violence*. 2016: Supreme Court of Indonesia.
- Aliansyah, M. A. (2021, Juni 24). *Mantan Napiter Poso Deklarasi Lawan Radikalisme dan Terorisme*. Retrieved from merdeka.com: <https://www.merdeka.com/peristiwa/mantan-napiter-poso-deklarasi-lawan-radikalisme-dan-terorisme.html>
- Andylala Waluyo. (2016, July 21). *ISIS Serukan Pembalasan Pasca Tewasnya Santoso*. Retrieved from VOAINONESIA: <https://www.voaindonesia.com/a/isis-serukan-aksi-balas-pasca-tewasnya-santoso/3428919.html>
- Arbi Sumandoyo. (2016, March 25). *Wawancara Ansyaad Mbai 1: Dalam waktu dekat gembong teroris Santoso ditangkap*. Retrieved from Merdeka.com: <https://www.merdeka.com/khas/dalam-waktu-dekat-gembong-teroris-santoso-ditangkap-wawancara-ansyaad-mbai-1.html>
- Armanto Heri S., S. S. (2019). LEARNING POLICY ON POLICE OPERATIONS OF TERRORISM TACKLING IN POSO DISTRICT. *European Journal of Humanities and Social Sciences*, No. 4, Sec. 13, Science Law, 119-125.
- Arnaz, F. (2016, Juli 21). *Ini Sepak Terjang Gembong Teroris Santoso*. Retrieved from beritasatu.com: <https://www.beritasatu.com/nasional/375681/ini-sepak-terjang-gembong-teroris-santoso>
- Bayu Galih. (2016, September 14). *Kelompok Teroris MIT Diprediksi Hancur Setelah Basri Ditangkap, tetapi....* Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2016/09/14/14495941/kelompok.teroris.mit.diprediksi.hancur.setelah.basri.ditangkap.tetapi>.
- BBCNEWS. (2014, August 4). *Indonesia larang penyebaran ideologi ISIS*. Retrieved from BBCNEWS INDONESIA: [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2014/08/140804\\_indonesia\\_larang\\_faham\\_isis](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/08/140804_indonesia_larang_faham_isis)

- BBCNEWS. (2016, April 28). *Etnik Uighur anggota Santoso tersisa satu orang di Poso*. Retrieved from BBCNEWS INDONESIA: [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/04/160427\\_indonesia\\_santoso\\_uighur\\_sisa](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/04/160427_indonesia_santoso_uighur_sisa)
- BBCNEWS. (2018, Februari 27). *Sejumlah eks napi teroris 'bertobat atas inisiatif pribadi', peran pemerintah 'minim'*. Retrieved from BBC.COM: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43214086>
- Benjamin H. Friedman, H. M. (2008). Learning the Right Lessons from Iraq. *Policy Analysis*, 1-13.
- Berschinski, R. G. (2007). AFRICOM'S DILEMMA: THE "GLOBAL WAR ON TERRORISM," "CAPACITY BUILDING," HUMANITARIANISM, AND THE FUTURE OF U.S. SECURITY POLICY IN AFRICA. *Strategic Studies Institute*, 1-52.
- Bustan, T. S. (2021, Januari 06). *Deradikalisasi Seiring dengan Kesejahteraan*. Retrieved from MEDIA INDONESIA: <https://mediaindonesia.com/fokus/374358/deradikalisasi-seiring-dengan-kesejahteraan>
- Chavy, A. (2018, January 8). *Indonesia's War on Terror is Far from Over*. Retrieved from georgetownsecuritystudiesreview: <https://georgetownsecuritystudiesreview.org/2018/01/08/indonesias-war-on-terror-is-far-from-over/>
- David P. Oakley, P. P. (2012). Ten Years of GWOT, the Failure of Democratization and the Fallacy of "Ungoverned Spaces". *Journal Of Strategic Security*, 1-13.
- Dio Pratama. (2016, December 26). *Kaleidoskop 2016: Akhir Kisah Teroris Santoso*. Retrieved from Liputan6.com: <https://www.liputan6.com/news/read/2670280/kaleidoskop-2016-akhir-kisah-teroris-santoso>
- Dugis, V. (2008). Terorisme; Sebuah Tinjauan Politis. *Seminar Nasional, "Mengungkap Tabir di Balik Aksi Terorisme"* (pp. 1-8). Surabaya: Kerjasama Kesbangpol Depdagri Republik Indonesia dengan Yayasan Pusat Komunitas Indonesia (Center for Indonesian Communities Studies/CICS).
- DW. (2014, September 22). *Mujahidin Indonesia Timur Bantai Seorang Petani*. Retrieved from DW.com: <https://www.dw.com/id/mujahidin-indonesia-timur-bantai-seorang-petani/a-17939260>
- Erwin Dariyanto . (2016, April 11). *Memburu Kelompok Santoso*. Retrieved from detikNews: <https://news.detik.com/berita/d-3184724/ini-profil-dan-jejak-kejahatan-santoso-yang-kini-diburu-satgas-tinombala>
- Fauzi. (2016, July 19). *Satgas Tinombala memburu 19 anggota kelompok Santoso*. Retrieved from ANTARANEWS.COM: <https://www.antaraneWS.com/berita/573922/satgas-tinombala-memburu-19-anggota-kelompok-santoso>
- FX. Richo Pramono. (2016, April 18). *Journal: Santoso, dari Poso Jadi Ekstremis Radikal*. Retrieved from LIPUTAN6.COM: <https://www.liputan6.com/news/read/2481765/journal-santoso-dari-poso-jadi-ekstremis-radikal>

- Galamas, F. (2015). TERRORISM IN INDONESIA: AN OVERVIEW. *THE MILITANT GROUPS OF RADICAL IDEOLOGY AND VIOLENT NATURE SERIES AREA: INDIAN SUBCONTINENT AND SOUTHEAST ASIA*, 1-15.
- Gischa Prameswaria. (2021, June 7). *Reintegrasi Sosial: Pengertian, Tujuan dan Contohnya*. Retrieved from KOMPAS.COM: <https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/07/130000369/reintegrasi-sosial-pengertian-tujuan-dan-contohnya>
- Goepner, E. W. (2016). Measuring the Effectiveness of America's War On Terror. *This Spring 2016 issue of "Parameters"*, 107-120.
- Goodson, L. P. (2015). The U.S. and Afghanistan after 2014. *Asian Survey*, 249-272.
- Gunaratna, R. (2017). Strategic Counter-Terrorism: A Game Changer in Fighting Terrorism? *Counter Terrorist Trends and Analyses*, 1-5.
- Hakim, Rakhmat Nur. (2021, April 02). *Mengenal JAD dan MIT, Kelompok Teroris di Indonesia yang Berbaiat ke ISIS*. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/02/08000031/mengenal-jad-dan-mit-kelompok-teroris-di-indonesia-yang-berbaiat-ke-isis?page=all>
- Haryadi, A. d. (2017). Gerakan Politik Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dan Pengaruhnya terhadap Indonesia. *JURNAL TRANSBORDERS*, 1-19.
- Henshaw, A. D. (2015). Transnational Macro-Narrative Descendancy in Violent Conflict: A Case Study of the Mujahidin Indonesia Timur in Central Sulawesi . *Master of Policing, Intelligence and Counter-Terrorism*, 37-42.
- Hermawan, N. (2016, July 14). *Sinergi TNI Polri Dalam Satgasops Tinombala*. Retrieved from TNI Angkatan Darat: <https://tniad.mil.id/sinergi-tni-polri-dalam-satgasops-tinombala/>
- Hilmi, M. (2014). GENEALOGI DAN PENGARUH IDEOLOGI JIHADISME NEGARA ISLAM IRAQ DAN SURIAH (NIIS) DI INDONESIA. *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, 404-428.
- Holt, A. (2005, May 5). *Indonesia and the Global War on Terrorism: Jakarta's Mediocre Response to Terror*. Retrieved from The Jamestown Foundation: <https://jamestown.org/program/indonesia-and-the-global-war-on-terrorism-jakartas-mediocre-response-to-terror/>
- Ihsan, R. (2019). Peran Militer dalam Kontra-Terrorisme di Indonesia. *DEVIANCE: JURNAL KRIMINOLOG*, Vol.3, 54-68.
- Indonesia, P. (2004). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA. *Undang-Undang*, 1-42.
- INDRA MARTIAN PERMANA, F. A. (2019). GERAKAN INTELIJEN PADA KASUS TERORISME DI INDONESIA SEJAK KOMANDO JIHAD SAMPAI ISIS INDONESIA. *INSPIRE*, (49)1-(49)21.
- Intan Pratiwi. (2016, July 22). *Tinombala Jadi Operasi Teritorial*. Retrieved from REPUBLIKA.CO.ID: <https://www.republika.co.id/berita/koran/pro-kontra/16/07/22/oapl0118-tinombala-jadi-operasi-teritorial>

- Jakson, R. (2005). Explaining Turtore in the War on Terrorism. *'The Discursive Construction of Torture in the War on Terrorism: Narratives of Danger and Evil'*, 1-20.
- Kedang, A. Y. (2017). Internasionalisasi dan Internalisasi Wacana War on Terror. *Jurnal Sospol. Vol. 3 No. 2*, 21-42.
- Keisyah Aprilia. (2020, December 02). *MUJAHIDIN INDONESIA TIMUR KECIL TAPI MEMATIKAN: JALAN BERLIKU PERANGI KELOMPOK MILITAN TERAFILIASI ISIS, MIT (Bagian 3)*. Retrieved from BeritaBenar: <https://www.benarnews.org/indonesian/in-focus/mit/part3.html>
- Keisyah Aprilia. (2020, December 02). *MUJAHIN INDONESIA TIMUR KECIL TAPI MEMATIKAN: JALAN BERLIKU PERANGI KELOMPOK MILITAN TERAFILIASI ISIS, MIT (Bagian 1)*. Retrieved from BeritaBenar: <https://www.benarnews.org/indonesian/in-focus/mit/index.html>
- Kompas.com. (2016, June 23). *Santoso Ganti Teknik, Satgas Tinombala pun Ubah Strategi*. Retrieved from umm.ac.id: <https://www.umm.ac.id/id/nasional/santoso-ganti-teknik-satgas-tinombala-pun-ubah-strategi.html>
- Kushindarti, N. L. (2017). RESPONS PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN GERAKAN ISLAMIC STATE DI INDONESIA. *Jurnal Penelitian Politik*, 223-238.
- Kushindarti, N. L. (2017). RESPONS PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN GERAKAN ISLAMIC STATE DI INDONESIA. *Jurnal Penelitian Politik. Vol.4*, 223-238.
- Lenz-Raymann, K. (2014). Counter-Terrorism and Freedom of Religion in Central Asia. In K. Lenz-Raymann, *Securitization of Islam: A Vicious Circle* (pp. 241-255). Asia: Transcript Verlag.
- Lubabah, R.G. (2016, March 22). *Operasi memburu Santoso dari Camar Maleo sampai Tinombala*. Retrieved from merdeka.com: <https://www.merdeka.com/peristiwa/operasi-memburu-santoso-dari-camar-maleo-sampai-tinombala-splitnews-2.html>
- M, M. (2012). Respon Indonesia terhadap War on Terror : Beberapa Isu Kontroversial dalam Transisi Menuju Demokrasi. *Indonesian Journal of Social Sciences. Vol. 4. No. 1*, 1-10.
- Mbai, A. (2014). *Dinamika Baru Jejaring Teror di Indonesia*. Jakarta: AS production Indonesia.
- Mohamad Didi Permana, A. M. (2020). PERAN APARAT KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME DI KABUPATEN POSO. *Maleo Law Journal*, 27-42.
- Mubarak, M. Z. (2015). DARI NII KE ISIS: Transformasi Ideologi dan Gerakan dalam Islam Radikal di Indonesia Kontemporer. *Epistemé*, 77-98.
- Nainggolan, P. P. (2016). MENGAPA INDONESIA SANGAT RAWAN DARI ISIS/IS? *Politica Vol. 7 No. 2* , 145-173.
- Obsatar Sinaga, P. R. (2018). *Sinaga, Obsatar, Prayitno Ramelan, lan Montratama*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pabyantara, D. P. (2018). Terorisme di Indonesia: Antara Kepentingan Politik Negara dan Permasalahan Ontologis. *Global & Policy Vol.6*, 141-152.

- Redaksi-TNI-POLRI. (2017, January 3). *22 DPO Tewas, 12 Tertangkap, 19 Satgas Gugur*. Retrieved from SULTENGRAYA.COM: <https://sultengraya.com/read/30691/22-dpo-tewas-12-tertangkap-19-satgas-gugur/>
- Rezeki Revi Respati, A. W. (2020). Strategi Pemolisian Pencegahan Kejahatan Terorisme. *Jurnal Ilmu Kepolisian*. Vol. 14. No. 3, 189-209.
- Sahasrad, H. . (2016). TERORISME, AKHIR SEJARAH SANTOSO DAN MASA DEPAN TEROR DI INDONESIA. *Jurnal Review Politik*, 347-366.
- Selamat Ginting. (2016, January 12). *Kiblat Radikalisme Mengapa Mujahidin Indonesia Timur (MIT) menjadi sentral dari gerakan jaringan kelompok terduga teroris di Indonesia?* Retrieved from REPUBLIKA.co.id: <https://www.republika.co.id/berita/o0tyga1/kiblat-radikalisme-mengapa-mujahidin-indonesia-timur-mit-menjadi-sentral-dari-gerakan-jaringan-kelompok-terduga-teroris-di-indonesia>
- Singh, J. (2016, October 7). *Operation Tinombala: Indonesia's New Counter-Terrorism Strategy*. Retrieved from RSIS COMMENTARY: <https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2016/10/CO16251.pdf>
- Siregar, M. (2001, September 19). ADDRESS BY H.E. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI PRESIDENT REPUBLIC OF INDONESIA AT USINDO GALA DINNER. Whasington DC, United States, United States.
- Smyth, M. B. (2017). Countering Terrorism in the International Arena: An Evaluation. *Georgetown Journal of International Affairs*, 65-75.
- Solahudin, S. J. (2014). Terrorism in Indonesia, A Fading Threat? *Southeast Asian Affairs*, 139-147.
- Sri Lestari. (2016, July 20). *Santoso tewas, ancaman terorisme 'tak langsung melemah'*. Retrieved from BBC News: [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/07/160719\\_indonesia\\_santoso](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/07/160719_indonesia_santoso)
- Sugara, R. (2014). Santoso: The Terrorist Leader from Nowhere. *Counter Terrorist Trends and Analyses*, 23-26.
- Sumandoyo, A. (2016, September 4). *Di Balik Kharismaniknya Teroris Santoso di Poso*. Retrieved from tirta.id: <https://tirta.id/di-balik-kharismaniknya-teroris-santoso-di-poso-bGGo>
- Tempo.co. (2016, January 20). *Polisi Merilis 17 Nama Baru Teroris Poso*. Retrieved from TEMPO.CO: <https://nasional.tempo.co/read/737928/polisi-merilis-17-nama-baru-teroris-poso/full&view=ok>
- The Coalition Information Centers. (2002). *THE GLOBAL WAR ON TERRORISM "THE FIRST 100 DAYS"*. WASHINGTON, LONDON AND ISLAMABAD: THE COALITION INFORMATION CENTERS.
- Thimm, J. (2018). From Exception to Normalcy "The United States and the War on Terrorism". *SWP Research Paper* 7, 5-42.
- Torkelson, T. D. (2008). Ideas in Arms. *The Relationship of Kinetic and Ideological Means in America's Global*, 59-98.

- Wahono. (2019, Agustus 30). *Kebijakan Kontra-Terrorisme Di Indonesia Setelah Peristiwa 9/11: Analisis Konstruktivis*. Retrieved from Doktor Politik Islam-Illmu Politik: <https://s3pi.umy.ac.id/kebijakan-kontra-terorisme-di-indonesia-setelah-peristiwa-9-11-analisis-konstruktivis/>
- Wanto, A. M. (2015, October 29). *Islamic State: Understanding the Threat in Indonesia and Malaysia*. Retrieved from RSIS.edu.sg: <https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2015/10/CO15231.pdf>
- Wibisono, A. A. (2021). The Impact of Democratization and International Exposure to Indonesian Counter-Terrorism. *Global: Jurnal Politik Internasional*. Vol. 19. No. 2. Article. 4, 138-155.
- Wicaksono, M. (2021). Kewenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dalam Melakukan Upaya Paksa Terhadap Pelaku Terorisme. *Jurist-Diction Vol. 4 (1)*, 213-228.
- Yohanes Genius putu Sanjaya, A. J. (2020). STRATEGI PENCEGAHAN SERANGAN TERORIS DI INDONESIA MENGANALISIS WEAPONS MASS DESTRUCTION (WMD) OLEH POLRI, BNPT, BAPETEN, TNI, BNPB DAN KEMENPERIN. *Journal of Terrorism Studies*. Vol.2. No.1. Article. 7, 113-142.
- Zakiah. (2015, June 17). *Resosialisasi*. Retrieved from Kompasianabeyondblogging: <https://www.kompasiana.com/zakiyahazkari/54f46927745513a32b6c8a83/resosialisasi>

